



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)BAKESBANGPOL TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat hidayahnya serta inayah-Nya kami masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 dapat tersusun sesuai jadwal. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala Daerah atas kinerja yang telah dicapai dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, baik sebagai evaluasi maupun parameter dalam meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

Sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025, kami akan selalu berkomitmen untuk meningkatkan kinerja ke depannya. Kami berharap LKIP ini dapat memenuhi harapan seluruh *stakeholders* kota dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah di Kota Bekasi.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyusun LKIP ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan NKRI yang tercinta ini dan yang terakhir, kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, karenanya sumbang saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bekasi, 11 Maret 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik Kota Bekasi



Drs. Hudi Wijayanto, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19690121 199007 1 001

IKTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2025 dimaksudkan untuk menginformasikan Capaian Kinerja tahun 2025 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada Penertapan/Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang merupakan bentuk komitmen penuh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi telah melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan membuat Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahun 2025 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, memiliki tugas untuk mewujudkan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, yaitu:

- 1. Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi;
- 2. Meningkatnya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kehidupan harmoni di daerah.

Dalam kaitannya tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah membuat Penertapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis yang keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik. Capaian kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	MAKNA
1	Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi	Inklusi Sosial	7,63	8,13	Melampaui target

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	MAKNA
2	Meningkatnya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kehidupan harmoni di daerah	Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan	100%	100%	Mencapai target

Dari 2 (dua) sasaran strategis beserta sasaran indikatornya, seluruh target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Keberhasilan ini didukung oleh tersedianya APBD untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2025, pagu yang dianggarkan Rp 38.550.364.050,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 33.446.502.229,-. Persentase penyerapan anggaran Badan selama TA. 2025 sebesar 86,76%.

Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) dianggarkan Rp 2.184.283.250,- dengan realisasi sebesar Rp 1.541.889.556,-. Persentase capaian BLPU Badan pada TA. 2025 sebesar 70,59%. Belanja Langsung Urusan (BLU) Badan dianggarkan Rp 6.615.891.800,- adapun realisasinya sebesar Rp 4.091.502.803,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 61,84%. Untuk Belanja Hibah dianggarkan RP. 19.168.672.000, untuk hibah Ormas dan bantuan keuangan Partai Politik dengan realisasi sebesar Rp 18.183.672.000,- dan persentase penyerapan anggaran sebesar 94,86%. Untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) dianggarkan sebesar Rp 10.581.517.000,- dengan realisasi sebesar Rp 9.629.437.870,- dan persentase penyerapan anggaran sebesar 91,00%. Bila ditinjau dari jenis belanja, Belanja Operasi Badan Kesbangpol pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 38.550.364.050,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 33.393.054.273.- atau 86,62%.

Secara keseluruhan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi pada Tahun 2025 telah memenuhi harapan. Meskipun demikian pada Tahun 2025 dan seterusnya akan terus ditingkatkan akselerasinya dengan melakukan upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah agar senantiasa dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai. Perlunya kerjasama, saling pengertian dari berbagai pihak yang terkait baik kritik dan saran sebagai bahan masukan untuk perbaikan dimasa datang.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada sasaran yang telah ditetapkan menunjukan beberapa tantangan yang perlu

menjadi perhatian bagi Badan Kesbangpol Kota Bekasi ke depan, sebagai berikut :

1. Keadaan masyarakat Kota Bekasi yang heterogen sehingga dapat menjadi salah satu pemicu munculnya gesekan sosial;
2. Masih terdapat peredaran gelap Narkoba di Kota Bekasi yang memerlukan perhatian, penanganan dan penanggulangan dengan deteksi dini dan pencegahan dini yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat;
3. Masih adanya masyarakat yang belum menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu karena kurangnya pemahaman tentang politik dan demokrasi;
4. Masih adanya Organisasi Kemasyarakatan yang tidak melaporkan organisasinya ke Badan Kesbangpol Kota Bekasi;
5. Masih maraknya kenakalan remaja yang mengancam keselamatan dan kenyamanan masyarakat Kota Bekasi;
6. Mempertahankan Kota Bekasi sebagai Kota dengan predikat baik dalam kerukunan dan toleransi masyarakat (*The City of Tolerance*).

Sebagai penutup, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 ada manfaatnya bagi sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan yang semakin baik.

Semoga ALLAH SWT senantiasa membimbing kita selalu.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

IKTISAR EKSEKUTIFii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

BAB 1 1

PENDAHULUAN 1

 1.1 LATAR BELAKANG.....1

 1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI3

 1.3 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA9

 1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI10

 1.5 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI12

 1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN DAN PENULISAN17

BAB 219

PERENCANAAN KINERJA.....19

 2.1 RENCANA STRATEGIS.....19

 2.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....20

 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....23

 2.4 PERJANJIAN KINERJA 202524

BAB 327

AKUNTABILITAS KINERJA27

 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI27

 3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA29

 3.3 REALISASI ANGGARAN48

 3.4 INOVASI52

 3.5 PRESTASI DAN PENGHARGAAN55

 3.6 KOLABORASI LINTAS SEKTOR.....56

BAB 463

PENUTUP63

 4.1 KESIMPULAN63

 4.2 KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA63

 4.3 RENCANA TINDAK.....64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi Berdasarkan Unit Kerja (s.d bulan Desember 2025)5

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi Menurut Pendidikan (s.d bulan Desember 2025)6

Tabel 1. 3 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per Desember 20259

Tabel 1. 4 Daftar Sarana Perkantoran Dan Kondisinya Per Desember 2025 ...9

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Tahun 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi22

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol Kota Bekasi24

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol Berdasarkan Triwulan25

Tabel 2. 4 Pagu anggaran Bakesbangpol25

Tabel 3. 1 Analisis Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi TA 2025.....28

Tabel 3. 2 Capaian Program Badan Kesbangpol untuk Mendukung Sasaran meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi Tahun 2025.....32

Tabel 3. 3 Rekapitulasi Partai Politik di Kota Bekasi yang Mendapatkan Bantuan Keuangan.....35

Tabel 3. 4 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja 2025 dengan Tahun lalu (Sasaran Strategis 1)40

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Renstra-PD (Sasaran Strategis 1)41

Tabel 3. 6 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Nasional (Sasaran Strategis 1)41

Tabel 3. 7 Analisis Pencapaian Indikator Utama Persentase Kasus SARA yang diselesaikan42

Tabel 3. 8 Capaian Program Badan Kesbangpol Untuk Mendukung Sasaran Meningkatnya Kewaspadaan dan Kesadaran Masyarakat Dalam Mendukung Kehidupan Harmoni di Daerah.....43

Tabel 3. 9 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja 2025 dengan Tahun lalu (Sasaran Strategis 2)45

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Akhir Renstra-PD (Sasaran Strategis 2)46

Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Nasional (Sasaran Strategis 2)46

Tabel 3. 12 Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Per Program Tahun 202548

Tabel 3. 13 Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 202549

Tabel 3. 14 Renja Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.....56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Diagram Pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Esselonoring 5
Gambar 1. 2 Diagram pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Unit Kerja6
Gambar 1. 3 Diagram pegawai Badan Kesbangpol Menurut Pendidikan7
Gambar 1. 4 Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi8
Gambar 2. 1 Keterkaitan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Dengan Tujuan dan Renstra Badan Kesbangpol21
Gambar 2. 2 Infografis Indikator Nilai Inklusi Sosial30
Gambar 3. 1 Dokumentasi kegiatan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Bekasi Tahun 202533
Gambar 3. 2 Dokumentasi kegiatan Bela Negara Kota Bekasi Tahun 2025...33
Gambar 3. 3 Dokumentasi kegiatan Monev Bantuan Keuangan Parpol di Kota Bekasi TA 202534
Gambar 3. 4 Dokumentasi kegiatan Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2025 Terkait Toleransi dan Anti Radikalisme35
Gambar 3. 5 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi P4GN Untuk Masyarakat di Kota Bekasi Tahun 202536
Gambar 3. 6 Dokumentasi Penghargaan Harmony Award Tahun 2025.....37
Gambar 3. 7 Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi P4GN Tahun 2025.....38
Gambar 3. 8 Infografis Persentase Konflik Sosial Daerah yang diselesaikan .42
Gambar 3. 9 Dokumentasi Kegiatan Kewaspadaan Dini dan Deteksi Dini Tahun 202544
Gambar 3. 10 Dokumentasi Kegiatan Tim Pengawasan Dini dan FGD FKDM di Kota Bekasi Tahun 202553
Gambar 3. 11 Dokumentasi Kajian Pemetaan Konflik: Suku, Ras dan Golongan di Kota Bekasi Tahun 202554
Gambar 3. 12 Dokumentasi Penghargaan Harmony Award Dari Kementerian Agama RI Untuk Kota Bekasi di Tahun 202555

1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu persyaratan terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja tahunan dan menyampaikan ke Wali Kota Bekasi.

Oleh karena itu, melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan misi organisasi dapat diukur dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan. Evaluasi kinerja tersebut dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap 3 aspek, yaitu:

- 1) **Akuntabilitas Manajemen**, aspek ini terfokus pada pengukuran kesanggupan dan efesiensi dalam mengalokasikan sumber daya manajemen, seperti dana, asset (harta kekayaan), tenaga kerja, maupun sumber daya yang lain;

- 2) Akuntabilitas Proses,** aspek ini terfokus pada pertanggungjawaban kebijakan, strategis dan proses pelaksanaan kinerja organisasi yang telah dilakukan. Proses ini dimulai dari perumusan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian sampai dengan evaluasi serta tindakan-tindakan koreksi terhadap proses yang sudah dilakukan;
- 3) Akuntabilitas Program,** pengukuran ini dilakukan terhadap program-program organisasi yang telah dilakukan apakah telah memberikan kepuasan kepada publik. Selama ini, keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap sumber daya, terutama anggaran, sedangkan yang lainnya diabaikan, seharusnya keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Tujuan penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi adalah:

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, hasil guna, bersih dan akuntabel serta mendorong tercapainya good governance, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya;
3. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis;
4. Menilai apakah pencapaian output dan outcome kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditentukan serta waktu yang disediakan.

Penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tahun 2025 dimaksudkan untuk menyajikan Capaian Indikator Utama (IKU) dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategi (RENSTRA) Badan tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 merancang strategi pembangunan secara komprehensif mencakup aspek tata kelola pemerintahan, pembangunan manusia, keamanan dan ketertiban kota, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan ekonomi. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi berkaitan langsung dengan tujuan RPJMD terkait

terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam mendukung iklim investasi di Kota Bekasi. Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

- Indikator Sasaran I:

Nilai Inklusi Sosial dengan satuan nilai. Indikator ini dipilih untuk mengukur cipta kondisi keadilan sosial, mengurangi diskriminasi dan membangun masyarakat yang harmonis dalam lingkup peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Indikator ini terdiri dari dimensi akses dan kesetaraan layanan publik; dimensi partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan kehidupan berorganisasi; serta dimensi toleransi dan kehidupan harmonis antar warga.

- Indikator Sasaran II:

Persentase konflik daerah yang diselesaikan. Indikator ini untuk mengukur pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memfasilitasi penyelesaian terhadap potensi konflik/konflik yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi pada tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan dibahas pada Bab III Akuntabilitas Kinerja pada laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tahun 2025 ini.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 129 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi, sebagai berikut:

1. Tugas Pokok yaitu:

Membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan nasional dan penanganan konflik untuk mencapai visi dan misi Badan.

2. Fungsi, yaitu:

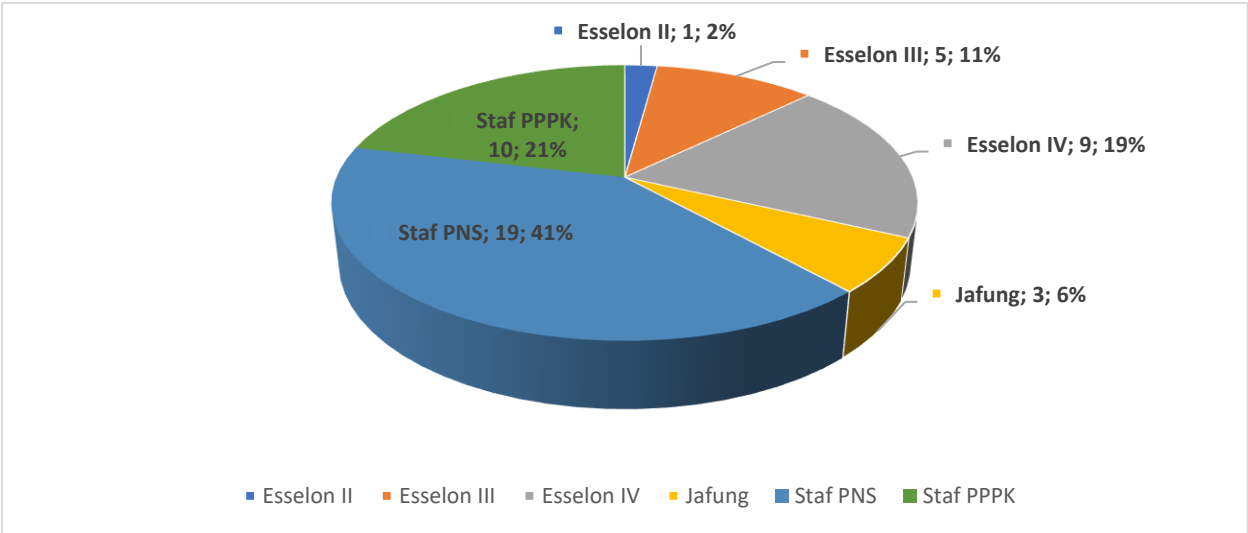
- 1) Perumusan program dan kegiatan jangka pendek, menengah dan jangka Panjang.
- 2) Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi unsur tata usaha, kepegawaian serta rumah tangga dan perlengkapan.
- 3) Fasilitasi Penyelenggaraan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.
- 4) Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.
- 5) Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan dan atau setiap saat penyelenggaraan kegiatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi yang memiliki kewewenangan dalam pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan dalam bidang Trantibum dan Politik, serta memiliki peran penting di dalam menjaga stabilitas pembangunan di Kota Bekasi. Peran tersebut akan sangat mempengaruhi kestabilan dinamika pembangunan di Kota Bekasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bakesbangpol dibantu oleh Sekretaris Bakesbangpol yang mengelola perencanaan, umum dan kepegawaian juga keuangan dan didukung oleh 4 (empat) bidang yaitu: Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, serta Bidang Politik Dalam Negeri.

Badan Kesbangpol Kota Bekasi dalam melaksanakan tupoksi pelayanan didukung dengan oleh 47 pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(PPPK). Secara sederhana, gambaran pegawai pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi menurut jabatan/ eselon dapat dilihat dari gambar diagaram di bawah ini:

Gambar 1. 1 Diagram Pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Esselonoring



Sejumlah pegawai yang tersedia di Badan Kesbangpol Kota Bekasi tersebut kemudian ditempatkan ke unit-unit kerja yang tersedia, dengan perincian sebagai berikut:

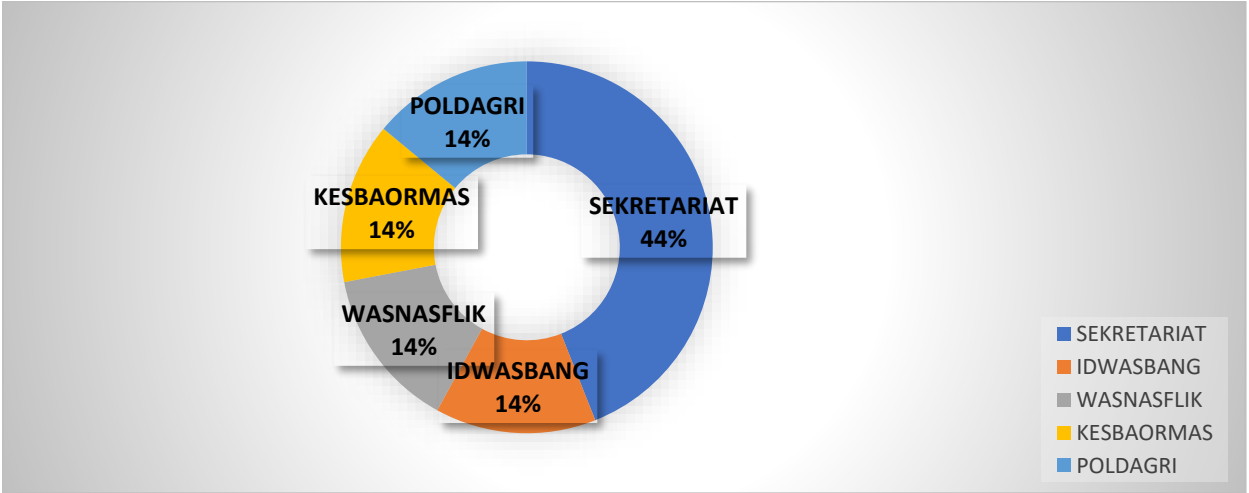
Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi Berdasarkan Unit Kerja (s.d bulan Desember 2025)

NO	Sekretariat/ Bidang	ASN			PPPK			Total
		L	P	JML	L	P	JML	
1	Sekretariat	6	8	13	3	2	5	19
2	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	4	1	5	1	1	2	7
3	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	5	1	6	-	-	-	6
4	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	4	2	6	-	-	-	6
5	Bidang Politik Dalam Negeri	6	-	6	1	2	3	9
Jumlah Total		26	11	38	5	5	10	47

Sumber Data: Umpeg Badan Kesbangpol (Diolah Perencanaan)

Secara sederhana, gambaran pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi berdasarkan unit kerja dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 1. 2 Diagram pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Unit Kerja



Apabila pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi ditinjau dari segi pendidikan, maka akan di dapatkan data pegawai sebagai berikut:

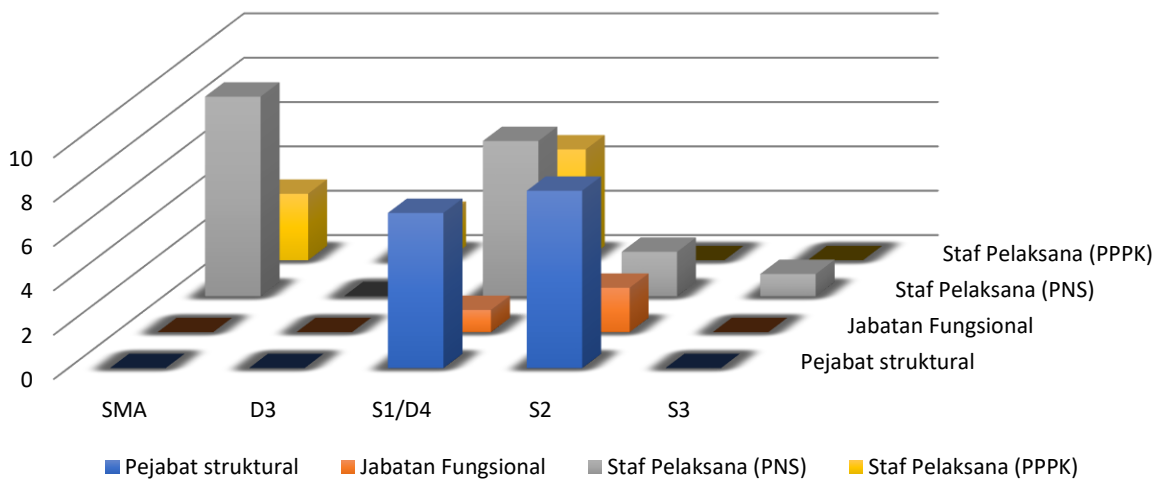
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi Menurut Pendidikan (s.d bulan Desember 2025)

SDM	Jumlah	Pendidikan Terakhir				
		S3	S2	S1/D4	D3	SMA
Pejabat struktural	15	-	8	7	-	-
Jabatan Fungsional	3	-	2	1	-	-
Staf Pelaksana (PNS)	19	1	2	7	-	9
Staf Pelaksana (PPPK)	10	-	-	5	2	3
Jumlah	47	1	12	20	2	12

Sumber Data : Umpeg Badan Kesbangpol (Diolah Perencanaan)

Berdasarkan data di atas, pegawai Badan Kesbangpol yang berpendidikan SMA sebanyak 25,53%, berpendidikan D3 sebanyak 4,25% , berpendidikan S1/D4 sebanyak 42,55%, berpendidikan S2 sebanyak 25,53% dan berpendidikan S3 sebanyak 2,14%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata pegawai Badan Kesbangpol berpendidikan SMA dan S1/D4. Secara sederhana, gambaran pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi menurut pendidikan dapat dilihat dari gambar berikut :

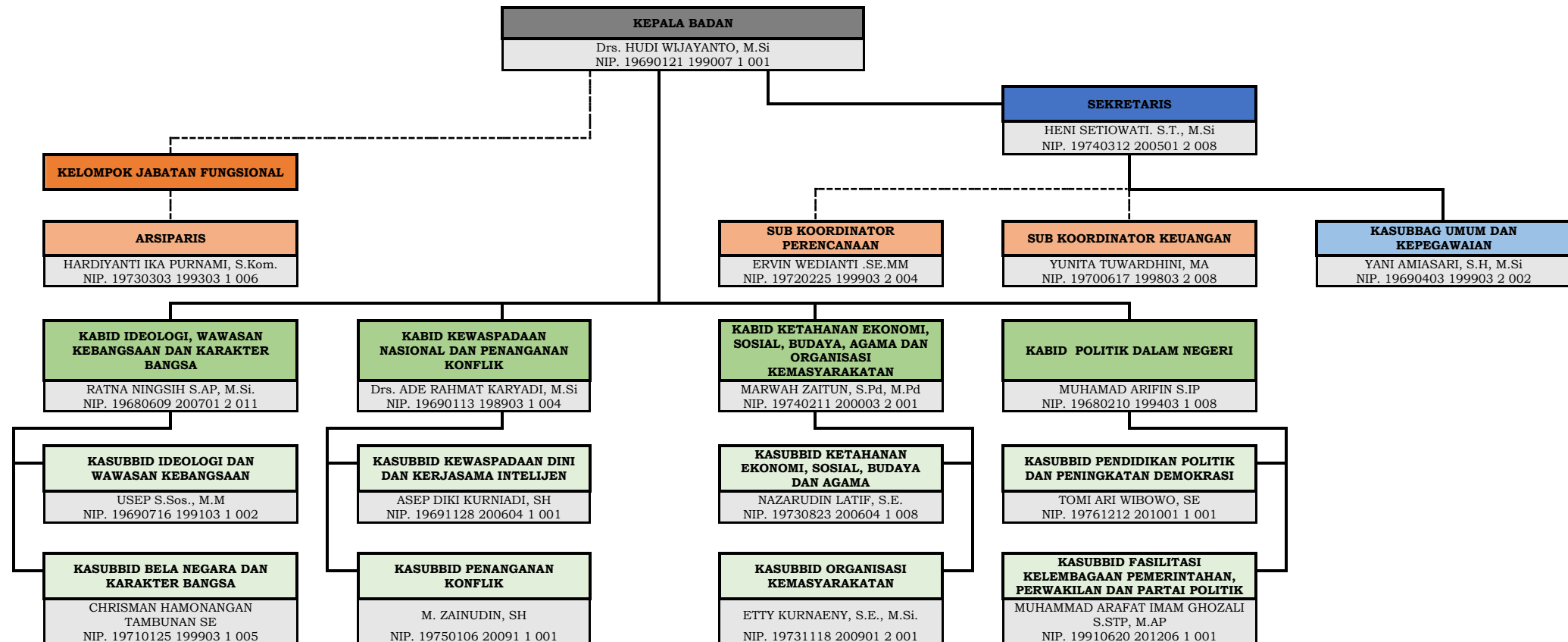
Gambar 1. 3 Diagram pegawai Badan Kesbangpol Menurut Pendidikan



Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas :

1. Kepala Badan, membawahkan:
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi:
 - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi:
 - a. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik;
6. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STUKTUR ORGANISASI BAKESBANGPOL
(Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021)
Gambar 1. 4 Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi



1.3 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, diperlukan sarana dan prasarana kerja serta asset perlengkapan yang dikelola sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.3.

Tabel 1. 3 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per Desember 2025

NO	NAMA	JUMLAH	KONDISI
KIB A			
1	Kendaraan Roda 2	13	B
2	Kendaraan Roda 4	82	B
3	Mesin Absen (time Recorder)	1	B
4	Lemari Besi	40	B
5	Rak Besi	4	B
6	Filling Cabinet Besi	40	B
7	Brandkas	1	B
8	Lemari Kaca	2	B
9	CCTV	2	B
10	Projector/Infocus	1	B
11	Meja Kerja	48	B
12	Kursi Kerja	48	B
13	Televisi	1	B
14	Sound System	1	B
15	Wireless	1	B
16	Dispenser	3	B
17	Kulkas	2	B
18	Proteksi Kebakaran (Hydrant, Apar)	1	B
19	Camera digital	1	B
20	Komputer PC	28	B
21	Laptop	10	B
22	Printer	11	B
KIB B			
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	B

(Keterangan : B = baik, R = rusak)

Selain itu dalam rangka melaksanakan tugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, sarana yang mendukung adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Daftar Sarana Perkantoran Dan Kondisinya Per Desember 2025

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ruang Rapat	1	Kondisi baik
2	Toilet/WC	1	Kondisi baik
3	Ruang Arsip	1	Kondisi baik
4	Ruang Repsepsionis dan kursi tunggu tamu	1	Kondisi baik
5	Ruang Kerja Kepala	1	Kondisi baik

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
6	Ruang Kerja Sekretaris	1	Kondisi baik
7	Ruang Kerja Sekretariat	1	Kondisi baik
8	Ruang Kerja Kepala Idwasbang	1	Kondisi baik
9	Ruang Kerja Bidang Idwasbang	1	Kondisi baik
10	Ruang Kerja Kepala Poldagri	1	Kondisi baik
11	Ruang Kerja Bidang Poldagri	1	Kondisi baik
12	Ruang Kerja Kepala Wasnasflik	1	Kondisi baik
13	Ruang Kerja Bidang Wasnasflik	1	Kondisi baik
14	Ruang Kerja Kepala Kesbaormas	1	Kondisi baik
15	Ruang Kerja Bidang Kesbaormas	1	Kondisi baik
16	Mushola Kantor	1	Kondisi baik
17	Kendaraan Dinas Kantor	95	Kondisi baik
18	Ruang Pantry	1	Kondisi baik
19	Air bersih dan listrik	Paket	Kondisi baik

Untuk sarana dan prasarana, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi belum terlalu ideal untuk ukuran kantor yang seharusnya. Salah satunya yaitu ruang pendukung seperti belum terdapat ruang perpustakaan dan ruang laktasi yang memadai. Hal ini perlu adanya perbaikan ruang kantor agar terciptanya yang lebih representatif.

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48'28"- 107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"- 6°30'6" Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai 210,49 km2 yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan propinsi (UU No. 23/2014). Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 23/2014 ini meliputi: demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Dari prinsip-prinsip dasar tersebut di atas, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan yang diimplementasikan di era otonomi diorientasikan untuk *mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal*. Kesejahteraan rakyat pada hakikatnya dapat diwujudkan melalui pencapaian hasil kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan yang sekurang-kurangnya harus meliputi aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan yang relatif merata, peningkatan kesempatan kerja, serta peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, terdapat beberapa isu-isu strategis yang terjadi di tahun 2025 yang di tangani oleh Badan Kesbangpol, diantaranya Kota Bekasi termasuk ke dalam Kota Multikultural yang terdiri dari banyaknya perbedaan unsur yang ada di dalam masyarakatnya yang terdiri dari berbagai suku, etnis, agama atau aliran kepercayaan, kondisi ini menjadikan Kota Bekasi sebagai daerah yang rawan konflik hal tersebut dapat menyebabkan masalah-masalah sosial yang muncul di Kota Bekasi.

Selain itu, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan beban sosial yang berat bagi masyarakat dan pemerintah. Besarnya pengangguran akan meningkatkan kerawanan sosial di Kota Bekasi. Bakesbangpol juga berupaya melakukan pengawasan terhadap penyebaran informasi yang tidak akurat, menjaga kondusivitas dan mencegah konflik sosial, penguatan pendidikan politik, serta koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak untuk menciptakan iklim sosial politik yang sehat. Bakesbangpol diharapkan dapat mengoptimalkan keberagaman politik sebagai kekuatan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dalam lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih

menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis, Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Bakesbangpol sebagai Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesatuan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Kerukunan Beragama dan Kemasyarakatan, serta Politik Dalam Negeri memiliki tugas untuk menjamin terciptanya persatuan dan kesatuan Bangsa demi mendukung tercapainya tujuan pembangunan Daerah.

1.5 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan Bakesbangpol pada tahun 2025 terdiri dari:

I. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)

1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

terdiri dari 6 kegiatan dan 15 Sub Kegiatan, yaitu:

- ✓ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- ✓ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
- ✓ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- ✓ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang;
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- ✓ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ✓ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

II. Belanja Langsung Urusan (BLU)

1.1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, yaitu:

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
 - Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
 - Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka.

1.2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial terdiri dari 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, yaitu:

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,

Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

1.3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu:

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya;
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

1.4. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, yaitu:

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
- Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;

1.5. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, yaitu:

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;

- Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Secara umum layanan organisasi Bakesbangpol menjalankan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait urusan penunjang lainnya di bidang Ketentraman dan ketertiban umum.

Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Bakesbangpol yaitu:

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan advokasi terkait wawasan kebangsaan, 4 (empat) pilar kebangsaan, bela negara, penguatan fungsi-fungsi pembauran kebangsaan dan pembentukan serta pembinaan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) di Kota Bekasi. Bidang Kesatuan Bangsa juga memiliki tugas memberikan pelatihan kepada masyarakat pemula untuk dijadikan sebagai kader bela negara.
2. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, memiliki tugas dan fungsi dalam hal menciptakan kerukunan umat beragama dan kemasyarakatan. Produk-produk layanan dalam bidang ini antara lain Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah, Survei peninjauan lokasi rumah ibadah dan sekretariat ormas, merumuskan kebijakan ormas dan kemasyarakatan, menerima audiensi pengurus rumah ibadah, pengurus ormas dan tokoh agama/masyarakat, serta Surat Keterangan Terdaftar (SKT)/Surat Tanda Lapor bagi Organisasi Kemasyarakatan.
3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terkait gejala/potensi kerawanan sosial yang ada di masyarakat. Melakukan kajian dan pemetaan wilayah kerawanan sosial di Kota Bekasi. Bidang ini juga bertugas untuk memberikan fasilitasi kepada Tim Kewaspadaan Dini Daerah untuk melaksanakan tugas menjaga trantibum di Kota Bekasi. Produk layanan dari Bidang ini adalah Surat Tanda Lapor Orang Asing dan Laporan situasi dan kondisi daerah.

4. Bidang Politik Dalam Negeri, memiliki tugas dan fungsi memberikan palatihan, sosialisasi, dan pendidikan terkait politik dalam negeri kepada masyarakat, dan pengurus Partai Politik. Merumuskan kebijakan tentang bantuan hibah dan bantuan keuangan yang akan diberikan kepada Partai Politik dan Lembaga Pemerintah. Bidang ini juga memberikan fasilitasi terkait pelaksanaan Pemantauan Situasi Politik di daerah.

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN DAN PENULISAN

Sistematika penyajian LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Kontrak Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

2

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan penyusunan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Bakesbangpol didasarkan atas Rencana Strategis Teknokratik Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Bakesbangpol Kota Bekasi TA. 2025, dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis dengan (dua) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program, kegiatan, sub kegiatan tahun 2025 dengan target satuan yang ingin dicapai dari program, kegiatan, sub kegiatan dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemenmendagri) Nomor 900.1-2850 tahun 2025 berisi tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan juga Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026. Rencana Strategis Badan telah memuat tujuan dan sasaran dalam tujuan pembangunan Kota Bekasi untuk periode 2025-2029. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kompetensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar

mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi yang telah ditetapkan dapat diketahui bahwa Pembangunan Kota Bekasi untuk periode 2025 – 2029, Badan Kesbangpol Kota Bekasi memiliki keterkaitan secara tupoksi terhadap sasaran RPJMD mengenai “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat”.

Dari sasaran tersebut, Badan Kesbangpol melakukan penetapan terkait pencapaian tujuan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, Badan Kesbangpol Kota Bekasi menetapkan tujuan badan, yaitu “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat”. Tujuan ini kemudian diukur melalui Nilai Indeks Harmoni.

Dari tujuan tersebut kemudian diturunkan ke dalam 2 (dua) sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi. Sasaran ini diukur dengan menggunakan Indikator Inklusi Sosial dengan rumus:

$$= \frac{\text{Skor Akses} + \text{Skor Partisipasi} + \text{Skor Toleransi}}{3}$$

2. Meningkatnya Kewaspadaan dan Kesadaran Masyarakat Dalam Mendukung Kehidupan Harmoni di Daerah. Sasaran ini diukur dengan menggunakan Indikator Persentase Konflik Sosial Daerah yang Diselesaikan dengan rumus:

$$= \frac{\text{Jumlah Konflik Sosial Daerah yang ditangani}}{\text{Jumlah Konflik Sosial Daerah yang dilaporkan}} \times 100 \%$$

Secara ringkas Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesbangpol Kota dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2. 1 Keterkaitan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Dengan Tujuan dan Renstra Badan Kesbangpol

Secara terperinci, tabel 2.1 di bawah ini akan menyajikan tujuan dan sasaran rencana penyelenggaraan pelayanan pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Pemaparan tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol yang telah ditetapkan ini akan dijabarkan ke dalam indikator sasaran untuk pencapaian target pelayanan selama 5 (Lima) tahun.

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Berdasarkan RPJMD/Renstra Badan 2025-2029 dan RPD/Renstra Teknokratik 2024-2026

RPJMD Kota Bekasi dan Renstra Badan 2025-2029											
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Data Existing	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-					
						1	2	3	4	5	6
						(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi	Indeks Harmoni		NA	6,47	6,48	6,49	6,51	6,53	6,55
				Inklusi Sosial	7,63	7,63	7,65	7,67	7,69	7,71	7,73
		Meningkatnya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kehidupan harmoni di daerah		Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
RPD Kota Bekasi dan Renstra Teknokratik Badan 2024-2026											
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Data Existing	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-					
						1	2	3			
						2024	2025	2026			
1	Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Nilai AKIP Badan Kesbangpol		BB	BB	BB	BB			
				Nilai AKIP Badan Kesbangpol	BB	BB	BB	BB			
2	Merawat persatuan dan ksatuan masyarakat dengan mengemban aspek demokrasi, kebangsaan dan kerukunan serta keberagaman	Terwujudnya kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi	Persentase pembinaan persatuan dan kesatuan dengan mengemban aspek demokrasi, kebangsaan dan kerukunan serta keberagaman bagi masyarakat yang dilaksanakan Kesbangpol Kota Bekasi		100%	100%	100%	100%			

RPJMD Kota Bekasi dan Renstra Badan 2025-2029											
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Data Existing	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-					
						1	2	3	4	5	6
						(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
				Persentase Kasus SARA yang diselesaikan	100%	100%		100%		100%	

Sumber Data: RPJMD Kota Bekasi 2025-2029/ Renstra Badan Kesbangpol 2025-2029 dan RPD Kota Bekasi 2024-2026/ Renstra Teknokratik Badan Kesbangpol 2024-2026

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- 1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi menetapkan menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

- 1. Inklusi sosial di Kota Bekasi. Indikator ini dipilih untuk mengukur cipta kondisi keadilan sosial, mengurangi diskriminasi dan membangun masyarakat yang harmonis dalam lingkup peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Indikator ini diukur melalui 3 (tiga) dimensi yaitu, dimensi akses dan kesetaraan layanan publik, dimensi partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan kehidupan berorganisasi, serta dimensi toleransi dan kehidupan harmonis antar warga di Kota Bekasi. Dimensi diukur melalui kombinasi data kuantitatif (Partisipasi Akses) dan Data Kualitatif (Hasil Survei Presepsi). Setiap dimimensi dinormalisasi dalam Skala 1 – 10, lalu dirata – ratakan untuk mendapatkan Nilai Indeks Inklusi Sosial Tahunan. Adapun rumusan pengukuran / formulasi Indikator Inklusi Sosial (IIS) sebagai berikut:

=
$$\frac{\text{Skor Akses} + \text{Skor Partisipasi} + \text{Skor Toleransi}}{3}$$

- 2. Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan. Indikator ini fokus terhadap bagaimana peranan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam memfasilitasi

penanganan terhadap konflik yang diterima atau yang terlaporkan, sehingga dalam formulasi rumusan pengukuran kinerja sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Konflik Sosial Daerah yang ditangani}}{\text{Jumlah Konflik Sosial Daerah yang dilaporkan}} \times 100 \%$$

Untuk penjelasan lebih terperinci dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol Kota Bekasi

BERDASARKAN RPJMD KOTA BEKASI 2025-2029 DAN RENSTRA BADAN KESBANGPOL 2025-2029					
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN/ RUMUS	SATUAN	TARGET 2025
1	Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi	Inklusi Sosial	$= \frac{\text{Skor Akses} + \text{Skor Partisipasi} + \text{Skor Toleransi}}{3}$	Nilai	7,63
2	Meningkatnya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kehidupan harmoni di daerah	Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan	$= \frac{\text{Jumlah Konflik Sosial Daerah yang ditangani}}{\text{Jumlah Konflik Sosial Daerah yang dilaporkan}} \times 100 \%$	Persen	100%
BERDASARKAN RPD KOTA BEKASI 2024-2026 DAN RENSTRA TEKNOKRATIK BADAN KESBANGPOL 2024-2026					
1	Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Nilai AKIP Badan	Nilai AKIP Badan	Nilai	BB
2	Terwujudnya kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi	Persentase Kasus SARA yang diselesaikan	$= (\text{Jumlah Kasus SARA yang ditangani} / \text{Jumlah Kasus SARA yang dilaporkan}) \times 100$	Persen	100%

Sumber Data: Renstra Badan Kesbangpol 2025-2029

2.4 PERJANJIAN KINERJA 2025

Pada perjanjian kinerja TA. 2025, Badan Kesbangpol Kota Bekasi melaksanakan 6 (Enam) Program Pembangunan dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;

- 3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial;
- 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- 5. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
- 6. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Program-program pada Bakesbangpol Kota Bekasi dilaksanakan untuk mencapai target IKU yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol Berdasarkan Triwulan

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi	Inklusi Sosial	Nilai	7,63	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	7,63
2	Meningkatnya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kehidupan harmoni di daerah	Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan	% (Persen)	100	Triwulan 1	25%
					Triwulan 2	25%
					Triwulan 3	25%
					Triwulan 4	25%

Sumber Data: Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesbangpol Kota Bekasi TA 2025 dan Rencana Aksi 2025

Untuk mencapai hasil kinerja pada tabel di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi diberikan dukungan anggaran APBD Kota sebesar Rp. 38.550.364.050,- dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Pagu anggaran Bakesbangpol

PROGRAM		PAGU ANGGRAN	TRIWULAN	TARGET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.765.800.250	Triwulan I	Rp. 3.763.274.254
			Triwulan 2	Rp. 3.379.097.364
			Triwulan 3	Rp. 2.524.059.900
			Triwulan 4	Rp. 3.099.368.732
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.653.737.300	Triwulan I	Rp. 102.884.000
			Triwulan 2	Rp. 560.286.400
			Triwulan 3	Rp. 563.387.400
			Triwulan 4	Rp. 427.179.500
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 9.779.956.500	Triwulan I	Rp. 7.150.000.000
			Triwulan 2	Rp. 2.008.792.000
			Triwulan 3	Rp. 132.000.000
			Triwulan 4	Rp. 489.164.500
4	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan	Rp. 9.957.582.000	Triwulan I	Rp. -
			Triwulan 2	Rp. 9.289.315.000
			Triwulan 3	Rp. 87.444.900
			Triwulan 4	Rp. 580.822.000

PROGRAM		PAGU ANGGRAN	TRIWULAN	TARGET
	Pengembangan Etika serta Budaya Politik			
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 1.066.848.000	Triwulan I	Rp. 0
			Triwulan 2	Rp. 0
			Triwulan 3	Rp. 946.938.000
			Triwulan 4	Rp. 119.910.000
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 3.326.440.000	Triwulan I	Rp. 1.132.327.200
			Triwulan 2	Rp. 1.030.837.800
			Triwulan 3	Rp. 729.055.000
			Triwulan 4	Rp. 434.220.000

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesbangpol Kota Bekasi TA.2025 dan Rencana Aksi TA. 2025

3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu proses pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja institusi pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Proses pengukuran kinerja dilakukan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang di dalamnya menyajikan beberapa. Dokumen LKIP disusun dengan melakukan analisa dan pengumpulan data pendukung untuk melihat seberapa besar sasaran kinerja yang ditargetkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dicanangkan pada Tahun 2025 dapat dicapai.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi disusun dengan berpedoman kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dilakukan dengan mengukur indikator kinerja pada setiap sasaran strategis yang ada di Rencana Startegis (Renstra) Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan aspek realisasi pelaksanaannya.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Bakesbangpol Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan. Pada tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi telah melaksanakan tahapan-tahapan pembangunan untuk mencapai Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:

- 1) Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi;

2) Meningkatnya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kehidupan harmoni di daerah;

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Analisis Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi TA 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	KETERANGAN
RPJMD KOTA BEKASI 2025-2029/ RENSTRA BADAN 2025-2029						
1	Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi	Inklusi Sosial	Nilai	7,63	8,13	Tercapai
2	Meningkatnya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kehidupan harmoni di daerah	Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan	%	100%	100%	Tercapai
RPD KOTA BEKASI 2024-2026/ RENSTRA TEKNOKRATIK BADAN 2024-2026						
1	Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Nilai AKIP Badan Kesbangpol	Nilai	BB	BB	Tercapai
2	Terwujudnya kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi	Persentase Kasus SARA yang diselesaikan	%	100%	100%	Tercapai

(Sumber Data: Renstra Badan Kesbangpol 2025-2029)

Secara keseluruhan capaian sasaran Badan Kesbangpol telah mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk indikator ke-1 dengan sasaran “meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi diukur menggunakan indikator Inklusi Sosial dengan rumus:

$$= \frac{\text{Skor Akses} + \text{Skor Partisipasi} + \text{Skor Toleransi}}{3}$$

Dengan menggunakan rumus di atas, nilai Inklusi Sosial di Kota Bekasi pada Tahun 2025 mencapai 8,13. Nilai ini melampaui target yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 7,63.

Pada indikator ke-2 dengan sasaran “meningkatnya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kehidupan harmoni di daerah diukur dengan menggunakan indikator persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan dengan rumus:

$$= \frac{\text{Jumlah Konflik Sosial Daerah yang ditangani}}{\text{Jumlah Konflik Sosial Daerah yang dilaporkan}} \times 100 \%$$

Dengan menggunakan rumus di atas, persentase konflik sosial yang diselesaikan pada Tahun 2025 mencapai 100%. Hasil ini menyamai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 100%. Pembahasan lebih rinci terkait 2 (dua) sasaran kinerja Badan Kesbangpol akan dibahas pada bagian Analisa Capaian Kinerja pada sub bab selanjutnya.

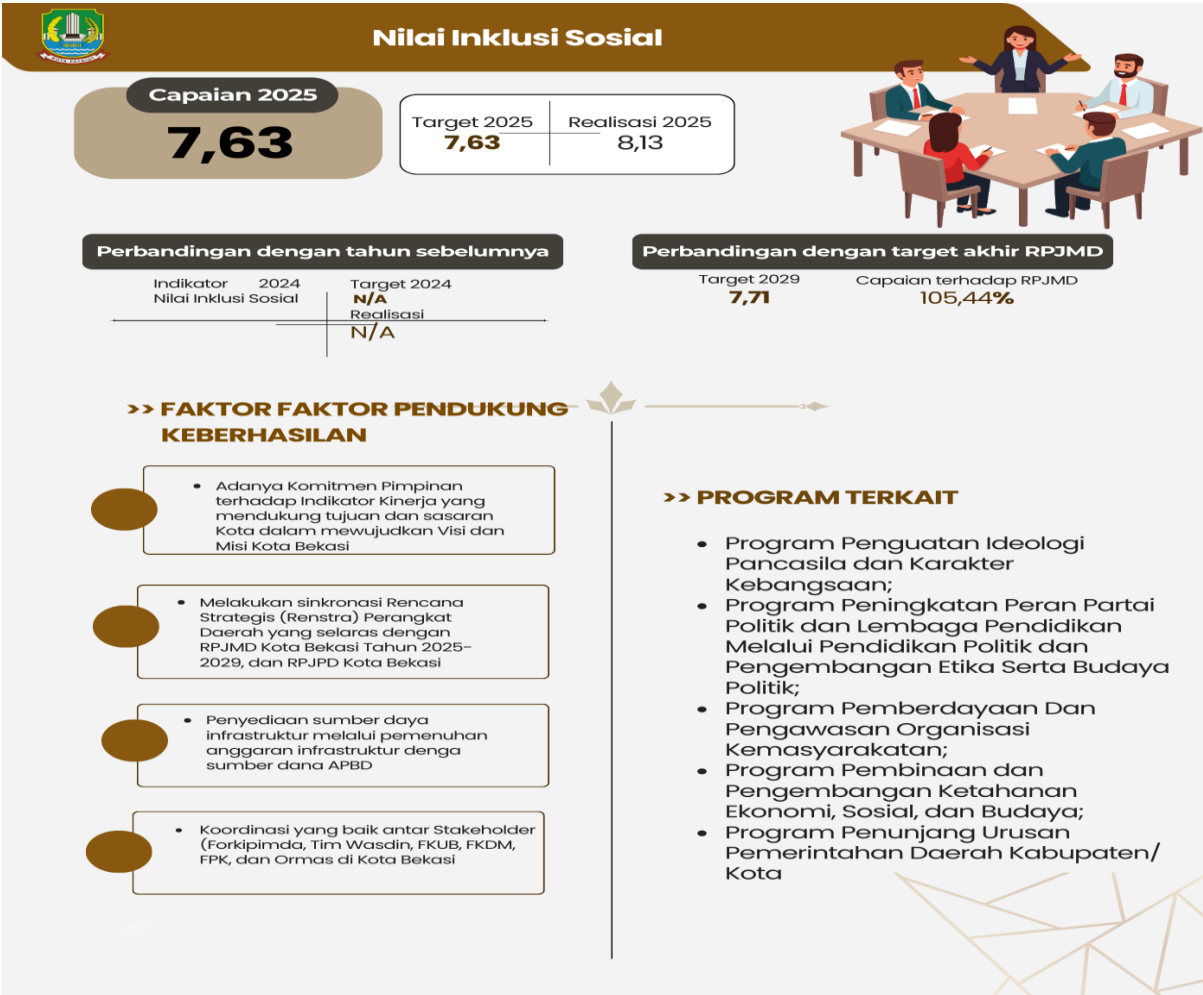
3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan penjabaran tabel Analisis Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol di atas, dapat ditarik analisa mengenai pencapaian kinerja Badan Kesbangpol TA 2025 sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM di Kota Bekasi.

Sasaran ini diukur dengan menggunakan **indikator Nilai Inklusi Sosial**. Nilai Inklusi Sosial di dapatkan dari penjumlahan skor akses, skor partisipasi, dan skor toleransi. **Skor akses** diperoleh dari hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang tersedia pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi melalui aplikasi SiSukma Pemerintah Kota Bekasi. Dari aplikasi tersebut diperoleh data dimensi skor akses Badan Kesbangpol Kota Bekasi dengan nilai 8,6.

Gambar 2. 2 Infografis Indikator Nilai Inklusi Sosial



Skor partisipatif diperoleh dari jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah, Ormas, politik dan Pemilu yang tercatat di Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Untuk Tahun 2025, tercatat partipasi masyarakat Kota Bekasi pada:

- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebesar 137 orang. Target program ini untuk Tahun 2025 sebesar 137 orang. Maka, persentase capaian partisipatif pada program ini sebesar 100%;
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik sebesar 40 orang. Target program ini untuk Tahun 2025 sebesar 40 Orang. Maka, persentase capaian partisipatif pada program ini sebesar 100%;
- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebesar 200 orang. Target program ini untuk Tahun 2025 sebesar 200 orang. Maka, persentase capaian partisipatif pada program ini sebesar 100%;

- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebesar 1.440 orang. Target program ini untuk Tahun 2025 sebesar 1.500 orang. Maka, persentase capaian partisipatif pada program ini sebesar 96,00%. Program ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena adanya efesiensi dan refocusing program;
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial sebesar 50 orang. Maka, persentase capaian partisipatif pada program ini sebesar 100%.

Berdasarkan data di atas, maka nilai skor partisipasi Badan Kesbangpol Kota Bekasi pada Tahun 2025 diperoleh sebesar 9,9.

Skor Toleransi diperoleh dari hasil penilaian Setara Institut terkait situasi toleransi di Kota Bekasi. Untuk Tahun 2025, skor indeks toleran Kota Bekasi masih menggunakan data Tahun 2024. Skor Indeks Toleran Kota Bekasi pada Tahun 2024 adalah 5,9.

Dari ketiga nilai dimensi di atas kemudian dilakukan akumulasi nilai sesuai rumus untuk mendapatkan nilai Inklusi Sosial. Dari akumulasi tersebut didapatkan nilai sebesar 8,13. Nilai ini melampaui target yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 7,63 dengan persentase capaian kinerja sebesar 106,55%. Keberhasilan ini tercapai melalui upaya-upaya yang sebagai berikut:

- ✓ Melakukan sinkronasi di dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah (Teknokratik). Sinkronasi tersebut dilakukan dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, RPJPD Kota Bekasi, RPJMD Provinsi dan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, serta RPJMN Kemendagri dan Renstra Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (PUM) Kemendagri RI;
- ✓ Dukungan dana dari Pemerintah Kota Bekasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
- ✓ Terbangunnya koordinasi yang baik diantara stakeholder terkait, Badan Kesbangpol bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forkopimda saling sinergis dalam rangka membangun kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi

Gambaran umum pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari indikator program yang mendukungnya. Pencapaian program adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Program Badan Kesbangpol untuk Mendukung Sasaran meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi Tahun 2025

NO	PROGRAM	IDIKATOR PROGRAM	TARGET 2025	REALISASI 2025	SATUAN	KET
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kesbangsaan	100	100	100%	Tercapai
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	100	100	100%	Tercapai
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	71	75	105,63 %	Tercapai
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	100	100	100%	Tercapai
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100%	Tercapai

Sumber : Badan Kesbangpol

Penjelasan capaian Kinerja Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Gambar 3. 1 Dokumentasi kegiatan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Bekasi Tahun 2025



Program ini memiliki satu indikator program yaitu cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Indikator ini memiliki rumus:

$$= \frac{\text{Jumlah Fasilitasi Pembinaan} \\ \text{Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan (ATHG)} \\ \text{Nasionalisme NKRI yang ditangani}}{\text{Jumlah Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan (ATHG)} \\ \text{Nasionalisme NKRI yang tercatat pada Badan Kesbangpol}} \times 100 \%$$

Program ini pada Tahun 2025 memiliki target 100% dengan realisasi yang dicapai sebesar 100%. Pada tahun 2025 ini jumlah masyarakat yang terlibat dalam program ini sebanyak 137 orang. Program ini mencakup:

- a. Pelaksanaan Bela Negara di Kota Bekasi; dan
- b. Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Bekasi

Gambar 3. 2 Dokumentasi kegiatan Bela Negara Kota Bekasi Tahun 2025



2) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Gambar 3. 3 Dokumentasi kegiatan Monev Bantuan Keuangan Parpol di Kota Bekasi TA 2025



Program ini memiliki satu indikator program yaitu persentase pendidikan politik pada kader partai politik. Indikator ini memiliki rumus:

$$= \frac{\text{Jumlah Pendidikan Politik pada Kader Partai}}{\text{Jumlah Kader Partai periode terpilih}} \times 100 \%$$

Capaian program ini pada tahun 2025 sebesar 100%. Pada tahun 2025 ini jumlah peserta yang mendapatkan pembinaan dan pendidikan politik daerah dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi sebanyak 1200 Orang. Pembinaan Politik dilakukan melalui beberapa kegiatan yang dilakukan berlandaskan tupoksi, antara lain:

- Melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) kepada kader Partai Politik dan aparatur KPU terkait bantuan Parpol TA. 2025 dan Hibah KPU Tahun 2025;
- Menjadi narasumber dalam kegiatan-kegiatan pendidikan politik yang diadakan oleh institusi mitra;
- Memberikan fasilitasi bantuan keuangan bagi parpol di Kota Bekasi yang mendapat hak dan kedudukannya di parlemen. Pada Tahun 2025, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bekasi nomor 200.1.5.3/Kep.199-Kesbangpol/IV/2025 tanggal 10 April 2025 terdapat 9 (Sembilan) Parta Politik yang mendapatkan bantuan keuangan, antara lain:

Tabel 3. 3 Rekapitulasi Partai Politik di Kota Bekasi yang Mendapatkan Bantuan Keuangan

No	Nama Partai	Perolehan Kursi	Perolehan Suara	Besarnya Bantuan Keuangan	Ket
1	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	11	296.139	Rp. 2.221.042.500	Penjelasan: - Rp. 7.500 adalah nilai bantuan keuangan per suara sah; - Jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu Tahun 2024 sebesar 1.238.384
2	Partai Golongan Karya (Golkar)	8	205.229	Rp. 1.539.217.500	
3	Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan	9	201.831	Rp. 1.513.732.500	
4	Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	6	156.776	Rp. 1.175.820.000	
5	Partai Amanat Nasional (PAN)	5	97.683	Rp. 732.622.500	
6	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5	82.544	Rp. 619.080.000	
7	Partai Demokrat	2	75.029	Rp. 562.717.500	
8	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2	64.635	Rp. 484.762.500	
9	Partai Persatuan Pembangunan	2	58.518	Rp. 438.885.000	

- Fasilitasi bantuan dana hibah bagi lembaga pemerintah di Kota Bekasi (KPU dan BAWASLU) berdasarkan SK Wali Kota Bekasi nomor 200.1.5.2/Kep.200-Kesbangpol/IV/2025 (KPU) dan SK Wali Kota Bekasi nomor 000.7.7.1/Kep. 696-Kesbangpol/XI/2025 (Bawaslu).

3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Gambar 3. 4 Dokumentasi kegiatan Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2025 Terkait Toleransi dan Anti Radikalisme



Program ini memiliki indikator persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif. Adapun formula dari indikator ini adalah

$$= \frac{\text{Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang melaporkan aktivitas pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi}}{\text{Jumlah Organisasi Kemasyarakatan terdaftar atau tercatat pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi}} \times 100 \%$$

Pada tahun 2025 ini target pembinaan dan pemberdayaan kepada organisasi kemasyarakatan memiliki target sebesar 200 Orang, dengan realisasi capaian pembinaan sebesar 200 orang. Untuk persentase Ormas yang aktif sebesar 75%. Hasil ini melampaui target yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 71%. Maka, persentase capaian program ini di Tahun 2025 sebesar 105,63%. Adapun pembinaan Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi meliputi:

- a) Fasilitasi bantuan dana hibah bagi Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bekasi. Pada Tahun 2025, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bekasi nomor 000.7.7.1/Kep.306-TU/VI/2024 Tentang Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran 2025 tanggal 10 Juni 2024, Badan Kesbangpol Kota Bekasi mengelola dana hibah dan bantuan sosial untuk 24 Ormas dan Institusi Pemerintah;
 - b) Fasilitasi legalitas Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bekasi. Pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 44 Ormas mendapat Surat Tanda Lapor dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Total Ormas yang telah mendapatkan STL per desember 2025 adalah 336 Ormas;
 - c) Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang undangan yang berlaku terkait Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bekasi.
- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Gambar 3. 5 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi P4GN Untuk Masyarakat di Kota Bekasi Tahun 2025



Program ini memiliki indikator berupa “persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi. Adapun formula dari indikator ini adalah:

$$= \frac{\text{Jumlah Fasilitasi Pembinaan Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan (ATHG) Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang ditangani}}{\text{Jumlah Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan (ATHG) Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang tercatat pada Badan Kesbangpol}} \times 100 \%$$

Pada tahun 2025 target yang ditetapkan untuk program ini sebesar 100% dengan tingkat realisasi 100%. Program ini melakukan, diantaranya:

- a. Fasilitasi Sinergitas tokoh masyarakat Kota Bekasi dengan pemerintah daerah. Pada Tahun 2025 ini Badan Kesbangpol Kota Bekasi telah melakukan 20 kegiatan ekspose Ormas dan 44 kegiatan pelayanan pendaftaran Ormas. Adapun jumlah orang yang terfasilitasi dalam program ini sebesar 320 orang;
- b. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi dalam bentuk pemberian bantuan hibah dan koordinasi kegiatan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi. Kerjasama yang baik ini menghasilkan penghargaan Harmony Award Tahun 2025;

Gambar 3. 6 Dokumentasi Penghargaan Harmony Award Tahun 2025



- c. Fasilitasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi dengan memberikan bantuan hibah kepada MUI;
- d. Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kota Bekasi. Pada Tahun 2025 Badan

Kesbangpol Kota Bekasi telah melaksanakan fasilitasi P4GN di Kota Bekasi sebanyak 7 kegiatan yang dihadiri 700 orang peserta dari siswa SMA sederajat;

Gambar 3. 7 Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi P4GN Tahun 2025



e. Fasilitasi Legalitas Penerbitan Pertimbangan Rumah Ibadah di Kota Bekasi.

f. Mengadakan Road Show tentang pencegahan toleransi dan anti radikalisme dengan peserta sebanyak 800 orang.

5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Program ini merupakan penunjang bagi Badan Kesbangpol Kota Bekasi dalam menjalankan Tupoksi selama Tahun 2025. Program ini memiliki indikator “persentase kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan daerah”. Pada Tahun 2025 program ini memiliki target sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 99,08%.

➤ **Perbandingan antara Data Kinerja yang telah dilaksanakan Tahun 2025 dengan Tahun lalu.**

IKU 1 : Nilai Inklusi Sosial

Defenisi Operasional :

Hasil penjumlahan ((Skor Akses+Skor Partisipasi+Skor Toleransi)/ 3). Realisasi Data Kinerja Tahun 2025:

1. **Skor akses** diperoleh dari hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang tersedia pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi melalui aplikasi SiSukma Pemerintah Kota Bekasi. Dari aplikasi tersebut diperoleh

data dimensi skor akses Badan Kesbangpol Kota Bekasi dengan nilai 8,6;

2. **Skor partisipatif** diperoleh dari jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah, Ormas, politik dan Pemilu yang tercatat di Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Untuk Tahun 2025, tercatat partisipasi masyarakat Kota Bekasi pada:

- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebesar 137 orang. Target program ini untuk Tahun 2025 sebesar 137 orang. Maka, persentase capaian partisipatif pada program ini sebesar 100%;
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik sebesar 40 orang. Target program ini untuk Tahun 2025 sebesar 40 Orang. Maka, persentase capaian partisipatif pada program ini sebesar 100%;
- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebesar 200 orang. Target program ini untuk Tahun 2025 sebesar 200 orang. Maka, persentase capaian partisipatif pada program ini sebesar 100%;
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebesar 1.440 orang. Target program ini untuk Tahun 2025 sebesar 1.500 orang. Maka, persentase capaian partisipatif pada program ini sebesar 96,00%. Program ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena adanya efesiensi dan refocusing program;
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial sebesar 50 orang. Maka, persentase capaian partisipatif pada program ini sebesar 100%.

Berdasarkan data di atas, maka nilai skor partisipasi Badan Kesbangpol Kota Bekasi pada Tahun 2025 diperoleh sebesar 9,9.

3. **Skor Toleransi** diperoleh dari hasil penilaian Setara Institut terkait situasi toleransi di Kota Bekasi. Untuk Tahun 2025, skor indeks toleran Kota Bekasi masih menggunakan data Tahun 2024. Skor Indeks Toleran Kota Bekasi pada Tahun 2024 adalah 5,9.

Dari ketiga nilai dimensi di atas kemudian dilakukan akumulasi nilai sesuai rumus untuk mendapatkan nilai Inklusi Sosial. Dari akumulasi tersebut didapatkan nilai sebesar 8,13. Nilai ini melampaui target yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 7,63 dengan persentase capaian kinerja sebesar 106,55%. Selanjutnya, perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Inklusi Sosial Kesbangpol Tahun 2025 dengan Tahun lalu, sebagaimana tergambar pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3. 4 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja 2025 dengan Tahun lalu (Sasaran Strategis 1)

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
1	Nilai Inklusi Sosial	Nilai	-	8,13

Berdasarkan penyajian tabel tersebut diatas, nilai Inklusi Sosial belum menjadi indikator kinerja pada Tahun 2024. Nilai Inklusi Sosial baru di adaptasi menjadi indikator kinerja Badan pada Tahun 2025, hal ini selaras dengan Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi 2025-2029 dan RPJMD Kota Bekasi 2025-2029.

➤ **Realisasi Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan target dalam Renstra Badan Kesbangpol 2025-2029.**

Jika dikaitkan dengan target Renstra Badan Kesbangpol 2025-2029, maka capaian kinerja Badan Kesbangpol pada indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra Badan. Indikator ini Tahun 2025 memiliki target sebesar 7,63, adapun realisasi dari indikator ini sebesar 8,13. Dengan demikian, persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 106,55%.

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Renstra-PD (Sasasaran Strategis 1)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Renstra di Tahun 2025	Capaian Realisasi Kinerja	Capaian Tahun Terakhir Renstra (Nilai)	Persentase Atas Capaian Akhir
1	Nilai Inklusi Sosial	Nilai	7,63	8,13	7,71	105,44%

➤ **Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)**

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 pada Sasaran Strategis 1 ini dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar atau target nasional (jika ada). Secara khusus untuk IKU pada Sasaran Strategis 1 ini, bahwa pada tingkat nasional secara khusus tidak terdapat target mengenai indikator kinerja ini sebagaimana tergambar pada tabel 3.5 berikut.

Tabel 3. 6 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Nasional (Sasaran Strategis 1)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Nasional Tahun 2025
1	Nilai Inklusi Sosial	8,13	Tidak Ada

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kehidupan harmoni di daerah.

Sasaran strategis yang kedua ini diukur dengan menggunakan Indikator **Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan** dengan rumus sebagai berikut:

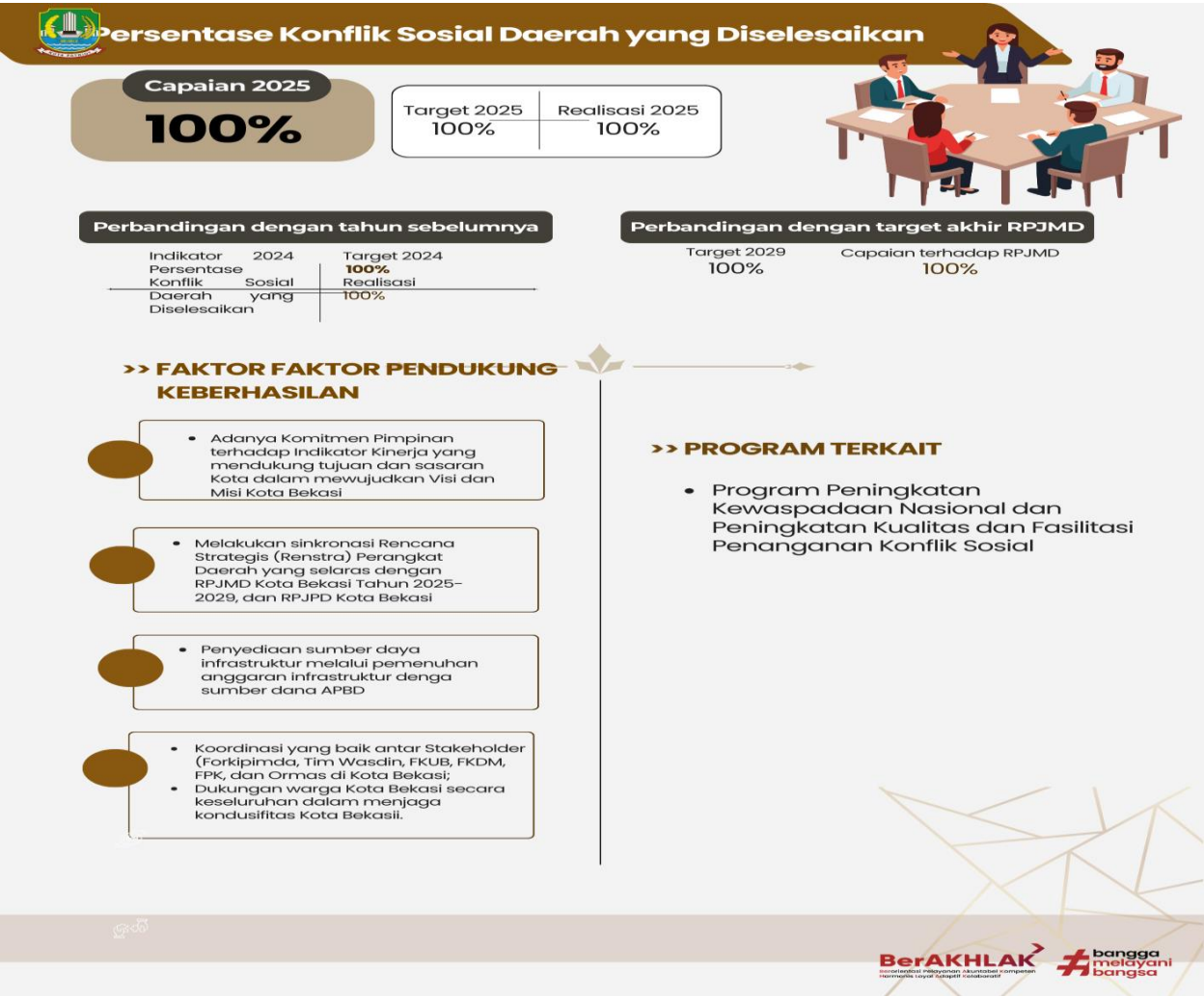
$$= \frac{\text{Jumlah Konflik Sosial Daerah yang ditangani}}{\text{Jumlah Konflik Sosial Daerah yang dilaporkan}} \times 100 \%$$

Pada tahun 2025, indikator kinerja ini telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan data yang dihimpun, sepanjang Tahun 2025 terdapat 39 (tiga puluh sembilan) kejadian potensi konflik/konflik sosial yang terjadi di Kota Bekasi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Konflik/ Potensi Konflik SARA sebanyak 1 kejadian;
- 2) Konflik/ Potensi Konflik Sosial Budaya sebanyak 38 kejadian.

Berdasarkan data tersebut, Badan Kesbangpol Kota Bekasi melalui Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik telah memfasilitasi penyelesaian 39 kejadian potensi konflik/ konflik sosial daerah yang terjadi di Kota Bekasi.

Gambar 3. 8 Infografis Persentase Konflik Sosial Daerah yang diselesaikan



Tabel 3. 7 Analisis Pencapaian Indikator Utama Persentase Kasus SARA yang diselesaikan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi	
1	Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan	%	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, Badan Kesbangpol berhasil menyelesaikan seluruh kejadian potensi konflik sosial/ konflik sosial yang terjadi di Kota Bekasi. Faktor-faktor yang mendukung tercapainya target tersebut adalah:

- a. Terbangunnya koordinasi yang baik diantara stakeholder terkait, Badan Kesbangpol bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Tim Kewaspadaan Dini dan Forkopimda saling sinergis dalam rangka meminimalisir terjadinya konflik sosial di masyarakat yang mencakup antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya di Kota Bekasi. Pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam mengurangi konflik sosial dengan memfasilitasi seluruh *stakeholder* untuk menyelesaikan potensi konflik/ konflik yang terjadi di Kota Bekasi.
- b. Dukungan warga Kota Bekasi secara keseluruhan dalam menjaga kondusifitas Kota Bekasi.
- c. Komitmen, kerja keras dan usaha seluruh pegawai dari Badan Kesbangpol sendiri.

Tercapainya target kinerja sasaran ini tidak bisa lepas dari tercapainya program perangkat daerah sebagai pendukung sasaran. Terdapat 1 (satu) program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi untuk mendukung sasaran ini, yaitu:

Tabel 3. 8 Capaian Program Badan Kesbangpol Untuk Mendukung Sasaran Meningkatnya Kewaspadaan dan Kesadaran Masyarakat Dalam Mendukung Kehidupan Harmoni di Daerah

NO	PROGRAM	IDIKATOR PROGRAM	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN	KET
1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100	100	100	Tercapai

- 1) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Gambar 3. 9 Dokumentasi Kegiatan Kewaspadaan Dini dan Deteksi Dini Tahun 2025



Program ini memiliki indikator program yaitu “persentase konflik sosial yang diselesaikan”. Adapun formula indikator ini adalah:

$$= \frac{\text{Jumlah Konflik Sosial yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Konflik Sosial yang ditangani}} \times 100 \%$$

Pada tahun 2025 ini jumlah penanganan potensi konflik yang telah diterima oleh Badan Kesbangpol sebanyak 39 Kasus, dan dari keseluruhan kasus tersebut dapat tertangani dengan baik oleh Badan Kesbangpol berserta jajaran unsur terkait dalam melakukan penanganan potensi konflik di Kota Bekasi. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk melaksanakan program ini, diantaranya:

- a. Fasilitas Tim Kewaspadaan Dini Daerah di Kota Bekasi (FKDM, TNI, POLRI, BINDA, KEJAKSAAN, IMIGRASI. dll);
- b. Fasilitas Forkopimda Kota Bekasi, forum ini diketuai Wali Kota Bekasi dan beranggotakan: Kapolresta, Komandan Kodim, Kepala Kejaksaan Negeri, dan unsur Pimpinan DPRD Kota Bekasi.
- c. Fasilitas legalitas Surat Keterangan Lapor Orang Asing di Kota Bekasi;

d. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan perundang undangan terkait Kewaspadaan Dini Daerah di Kota Bekasi;

➤ **Perbandingkan antara Data Kinerja yang telah dilaksanakan Tahun 2025 dengan Tahun lalu.**

IKU 2 : Persentase Konflik Sosial Daerah yang Diselesaikan

Defenisi Operasional :

Jumlah Konflik sosial daerah yang ditangani tahun (n) dibagi Jumlah konflik sosial daerah yang dilaporkan tahun (n) dikalikan 100%.

- Realisasi Data Kinerja Tahun 2023 s.d 2024 :
 - Jumlah Kasus SARA yang ditangani tahun n-1 (2024) : 1 Kasus
Realisasi Data Kinerja = $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$
 - Jumlah Kasus SARA yang ditangani tahun n (2025) : 39 Kasus
Realisasi Data Kinerja = $\frac{39}{39} \times 100\% = 100\%$
- Sebagaimana definisi operasional dari indikator kinerja ini, bahwa Semakin banyak kasus atau konflik yang terselesaikan, semakin besar pengaruhnya terhadap ketercapaian indikator tersebut. Selanjutnya, perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Konflik Sosial Daerah yang diselesaikan di Kota Bekasi Tahun 2025 dengan Tahun lalu, sebagaimana tergambar pada tabel 3.8 berikut.

Tabel 3. 9 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja 2025 dengan Tahun lalu (Sasaran Strategis 2)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan	Persen	100	100

➤ **Realisasi Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan target dalam Renstra Kesbangpol 2025-2029.**

Pada tahun 2025 indikator sasaran ini ditargetkan Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan adalah 100%. Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target realisasi kinerja sampai tahun 2029 pada Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi tahun 2025-2029, realisasi kinerja sampai

dengan tahun 2025 sebesar 100%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Akhir Renstra-PD (Sasaran Strategis 2)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian s.d Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Tahun Terakhir Renstra (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100

➤ **Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)**

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 pada Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kehidupan harmoni di daerah) ini dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar atau target nasional (jika ada). Secara khusus untuk IKU pada Sasaran Strategis 2 ini, bahwa pada tingkat nasional tidak terdapat target mengenai indikator kinerja ini sebagaimana tergambar pada tabel 3.10 berikut.

Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Nasional (Sasaran Strategis 2)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Nasional Tahun 2025
1	Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan	100%	Tidak Ada

Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan data eksisting pegawai per desember 2025, Badan Kesbangpol Kota Bekasi memiliki jumlah pegawai sebanyak 47 Aparatur (PNS dan P3K). Aparatur tersebut diberdayakan untuk memberikan pelayanan yang ada di Badan Kesbangpol. Pelayanan tersebut antara lain, menyelesaikan/ mediasi potensi konflik yang ada di Kota Bekasi sebanyak 39 Kejadian. Memberikan pelayanan permohonan izin penelitian/riset dan Magang dengan total sepanjang Tahun 2025 sebanyak 659 perizinan. Memberikan pelayanan informasi dan sosialisasi kepada Ormas yang

terlapor di Kota Bekasi dengan jumlah total sebanyak 336 Ormas. Pada Tahun 2025 Badan Kesbangpol Kota Bekasi memberikan surat keterangan lapor kepada Ormas sebanyak 44 surat keterangan. Aparatur juga diberdayakan untuk melakukan verifikasi bantuan keuangan dan hibah kepada Ormas dan organisasi pemerintah sebanyak 44 proposal di Tahun 2025. Berdasarkan uraian ini, secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi telah berhasil melaksanakan efisiensi penggunaan sumber daya manusia tanpa mengurangi kualitas mutu pelayanan

- **Analisis Efisiensi Anggaran**

Badan Kesbangpol juga melakukan efisiensi anggaran di TA. 2025. Alokasi anggaran Bakesbangpol Kota Bekasi pada tahun 2025 sebesar Rp. **46.615.263.760,-**. Kemudian dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. **8.064.899.710,-** atau 17.30% dari total anggaran. Sehingga, total pagu anggaran Badan Kesbangpol pada TA. 2025 menjadi Rp. **38.550.364.050,-** dengan rincian sebagai berikut, Belanja Langsung Urusan (BLU) Rp. 4.091.502.803,- dan Belanja Hibah Rp. 18.183.672.000,- Seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2025 dengan realisasi keuangan 87% dan realisasi fisik Kegiatan 97%.

- **Analisis Efisiensi Mesin dan Peralatan**

Efisiensi mesin atau peralatan adalah perbandingan antara input dan output yang optimal. Efisiensi mesin yang baik dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas. Berdasarkan data inventaris barang milik daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi memiliki aset tetap berjumlah 763 unit. Adapun kondisi aset tetap dimaksud, terdiri dari 735 unit dalam kondisi baik dan 28 unit dalam kondisi tidak baik.

- **Analisis Efisiensi Material/ Bahan**

Efisiensi material atau bahan adalah upaya untuk memproduksi produk atau layanan dengan menggunakan lebih sedikit bahan baku yang digunakan. Dalam rangka efisiensi material atau bahan baku dan mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berbasis paperless. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi telah memberikan pelayanan berbasis elektronik, antara lain penerbitan Surat Keterangan Riset/ Penelitian, Surat Keterangan Magang/ PKL, Surat Keterangan Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan Surat Administrasi Perkantoran di internal badan. Berdasarkan uraian di atas dapat

dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dapat mengefisiensi material atau bahan baku melalui penggunaan produk layanan yang berbasis elektronik.

- Analisis Efisiensi Metode

Efisiensi metode adalah suatu cara kerja atau proses dalam memaksimalkan hasil dari sebuah pekerjaan dengan sedikit sumber daya berupa dana, tenaga, atau waktu. Dalam upaya mengefisiensi metode yang digunakan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi telah memberikan pelayanan berbasis elektronik dengan jumlah 5 (lima) produk layanan berbasis elektronik. Metode ini dilakukan untuk optimalisasi proses administratif dan efisiensi waktu pelayanan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Bekasi.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.38.550.364.050,-** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp.38.550.364.050,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp.0,-**. Realisasi Belanja Operasi pada TA.2025 sebesar **Rp. 33.393.054.273** atau 86,62% dari total anggaran. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Tidak Langsung (**BTL**) sebesar **Rp. 10.546.517.000,-** dan **Belanja Langsung (BL)** sebesar **Rp.28.003.847.050,-**. **Belanja Langsung (BL)** terdiri dari **Belanja Langsung Urusan (BLU)** dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 6.615.891.800,-** untuk **Belanja Hibah** dianggarkan sebesar **Rp.19.168.672.000,-**. dan **Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)** dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp.2.219.283.250,-**. Anggaran tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Program-Program pembangunan Badan Kesbangpol sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Per Program Tahun 2025

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.535.520.760,-	Rp. 12.765.800.250,-
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 2.812.569.800,-	Rp. 1.653.737.300,-
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan	Rp. 9.800.000.000,-	Rp. 9.779.956.500,-

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
	Organisasi Kemasyarakatan		
4	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 15.229.773.200,-	Rp. 9.957.582.000,-
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 1.400.000.000,-	Rp. 1.066.848.000,-
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 3.837.400.000,-	Rp. 3.326.440.000,-
	TOTAL	Rp. 46.615.263.760	Rp. 38.550.364.050

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Total Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami perubahan dari Total Pagu Anggaran sebesar Rp. **46.615.263.760,-** menjadi Rp. **38.550.364.050,-**. Adapun realisasi anggaran yang dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas;

• Belanja Tidak Langsung	: Rp	9.629.437.870,-
• Belanja Langsung Penunjang Urusan	: Rp	1.541.889.556,-
• Belanja Langsung Urusan	: Rp	4.091.502.803,-
• Belanja Hibah	: Rp	18.183.672.000,-
Jumlah		: Rp 33.446.502.229,-

Secara terperinci, realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL), Belanja Langsung Urusan (BLU), Belanja langsung Penunjang Urusan (BLPU) dan Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 13 Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Ket
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.765.800.250	11.171.327.426	87,51	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.640.000	62.546.000	45,77	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	111.640.000	55.678.000	49,87	Tidak Efisien karena beberapa kode rekening tidak dapat dilakukan penyerapan anggaran yang disebabkan efesiensi dan refocusing
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	6.868.000	27,47	Tidak Efisien karena beberapa kode rekening tidak dapat dilakukan penyerapan anggaran

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Ket
				yang disebabkan efisiensi dan refocusing
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.596.517.000	9.641.432.870	91	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.581.517.000	9.629.437.870	91	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.000.000	11.995.000	80	Efisien
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	230.000.000	189.000.039	82,17	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200.000.000	184.000.039	92	Efisien
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	5.000.000	16,66	Tidak Efisien karena beberapa kode rekening tidak dapat dilakukan penyerapan anggaran yang disebabkan efisiensi dan refocusing
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.038.700.000	589.720.012	57	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	350.000.000	345.193.842	99	Efisien
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.700.000	38.278.750	99	Efisien
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	26.740.000	53,48	Tidak Efisien karena beberapa kode rekening tidak dapat dilakukan penyerapan anggaran yang disebabkan efisiensi dan refocusing
Fasilitasi Kunjungan Tamu	150.000.000	10.695.000	7,13	Tidak Efisien karena beberapa kode rekening tidak dapat dilakukan penyerapan anggaran yang disebabkan efisiensi dan refocusing
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	72.029.900	21	Tidak Efisien karena beberapa kode rekening tidak dapat dilakukan penyerapan anggaran yang disebabkan efisiensi dan refocusing
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000	96.782.520	97	Efisien
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.543.250	267.249.125	99	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	268.543.250	267.249.125	99	Efisien
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495.400.000	421.379.380	85	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	400.000.000	375.709.380	94	Efisien
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.400.000	45.670.000	48	Tidak Efisien karena beberapa kode rekening tidak dapat dilakukan penyerapan anggaran yang disebabkan efisiensi dan refocusing
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.653.737.300	1.371.461.000	82,93	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.653.737.300	1.371.461.000	82,93	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Ket
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500.000.000	365.547.500	73	Efisien
Pembentukan Paskibraka	1.153.737.300	1.005.913.500	87	Efisien
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	9.957.582.000	9.565.217.293	96	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	9.957.582.000	9.565.217.293	96	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9.868.672.000	9.565.217.293	97	Efisien
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	88.910.000	0	0	Tidak Efisien karena beberapa kode rekening tidak dapat dilakukan penyerapan anggaran yang disebabkan efesiensi dan refocusing
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	9.779.956.500	8.565.000.000	86	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	9.779.956.500	8.565.000.000	86	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	9.300.000.000	8.565.000.000	92	Efisien
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	479.956.500	0	0	Tidak Efisien karena beberapa kode rekening tidak dapat dilakukan penyerapan anggaran yang disebabkan efesiensi dan refocusing
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.066.848.000	631.650.000	59,21	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.066.848.000	631.650.000	59,21	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.066.848.000	631.650.000	59,21	Tidak Efisien karena beberapa kode rekening tidak dapat dilakukan penyerapan anggaran yang disebabkan efesiensi dan refocusing
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.326.440.000	2.088.391.803	63	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.337.400.000	2.266.420.500	63	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	334.240.000	103.500.000	31	Tidak Efisien karena beberapa kode rekening tidak dapat dilakukan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Ket
Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				penyerapan anggaran yang disebabkan efesiensi dan refocusing
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	537.200.000	521.719.800	97,12	Efisien
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2.455.000.000	1.463.172.003	60	Efisien
Total	38.550.364.050	33.393.047.522	97	Efisien

Beberapa catatan analisis pembiayaan tahun 2025 adalah melakukan efisiensi penggunaan anggaran dari total pagu sebesar Rp. **46.615.263.760,-** menjadi Rp. **38.550.364.050,-** Badan Kesbangpol berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp. **8.064.899.710,-** atau 17.30% dari total anggaran. Upaya efisiensi ini dilakukan untuk memastikan pembelanjaan anggaran yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan pencapaian target kinerja.

Untuk kedepannya efisiensi anggaran juga akan mempertimbangkan efektifitas pencapaian Zero Accident dalam pengelolaan urusan Pemerintahan Umum di Kota Bekasi yang memiliki target tinggi. Oleh karena itu, Badan Kesbangpol memerlukan sumber daya anggaran dan manusia yang kompeten untuk mencapai target tujuan yang telah ditetapkan.

3.4 INOVASI

Tantangan global dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut perangkat daerah untuk beradaptasi secara dinamis dan berpikir kreatif. Permasalahan serta keterbatasan sumber daya seharusnya dipandang sebagai pendorong untuk menciptakan gagasan dan ide-ide inovatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2025 ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi telah melakukan berbagai inovasi, antara lain:

a) Membentuk Tim Pengawasan Dini dan FGD FKDM

Gambar 3. 10 Dokumentasi Kegiatan Tim Pengawasan Dini dan FGD FKDM di Kota Bekasi Tahun 2025



Pengawasan dini memiliki manfaat yang sangat penting untuk menjaga stabilitas wilayah dan pembangunan demi kepentingan masyarakat. Dengan adanya pengawasan, stabilitas wilayah dapat dipetakan dengan baik. Selain itu, pengawasan juga meningkatkan akuntabilitas, mendorong transparansi pembangunan, serta memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota dan masyarakat. Lebih jauh lagi, pengawasan yang efektif dapat mencegah penyimpangan dan korupsi, serta meningkatkan kualitas kegiatan yang dilaksanakan, sehingga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Selain itu, pengawasan juga berperan penting dalam mencegah radikalisasi dan ekstremisme, serta mendukung pembangunan sosial dengan memastikan bahwa ormas tetap fokus pada tujuan yang positif dan konstruktif bagi masyarakat. Dengan demikian, pengawasan dini sangat krusial untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan negara. Penyelenggaraan pengawasan dini ini dilakukan secara kolaboratif oleh Badan Kesbangpol dan beberapa stakeholder terkait.

b) Kajian Pemetaan Konflik: Suku, Ras dan Golongan di Kota Bekasi

Gambar 3. 11 Dokumentasi Kajian Pemetaan Konflik: Suku, Ras dan Golongan di Kota Bekasi Tahun 2025

Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi area dan aktor dengan potensi konflik tinggi. Memahami akar penyebab konflik, bukan hanya gejala sosialnya, serta menyediakan rekomendasi kebijakan yang preventif dan berbasis toleransi sosial. Hasil pemetaan isu menunjukkan bahwa dinamika konflik di wilayah perkotaan seperti Bekasi tidak bersumber dari satu persoalan tunggal, melainkan dari interaksi kompleks antara isu struktural, kultural, dan informasional. Isu perizinan rumah ibadah menjadi “entry point” konflik struktural karena melibatkan relasi langsung antara masyarakat dan pemerintah. Ketika proses perizinan dianggap tidak transparan, persepsi diskriminatif muncul dan berkembang menjadi isu identitas yang lebih luas. Isu identitas ini kemudian diperkuat oleh rivalitas antar ormas dan kelompok agama, yang memperebutkan legitimasi sosial di ruang publik. Ormas-ormas dengan basis massa kuat cenderung memosisikan diri sebagai penjaga moral dan simbol keagamaan komunitas, namun perbedaan interpretasi ajaran dan klaim nilai sering kali berujung pada benturan. Dalam konteks ini, lemahnya kapasitas forum mediasi sosial (FKUB, FKDM, FPK) memperlemah kemampuan pemerintah dalam meredam gesekan antar kelompok.

Disinformasi dan ujaran kebencian menyebar dengan cepat dan melampaui kontrol aparat. Isu lokal yang seharusnya bisa diselesaikan secara

dialogis di tingkat masyarakat menjadi isu publik yang viral, memicu polarisasi digital dan memperkeruh hubungan antar komunitas. Politisasi isu SARA menjelang pemilu semakin memperburuk keadaan, di mana aktor politik menggunakan narasi identitas untuk memperkuat basis dukungan elektoralnya. Secara keseluruhan, issue mapping ini menegaskan bahwa pencegahan konflik sosial harus dilakukan secara berlapis: memperbaiki kebijakan publik di tingkat struktural, memperkuat forum dialog di tingkat sosial, dan mengelola narasi publik di tingkat informasi. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peran FKUB dan FKDM sebagai institusi preventive diplomacy, disertai strategi literasi digital dan komunikasi publik yang proaktif agar setiap isu sensitif dapat segera diidentifikasi dan dikelola sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

3.5 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

- a) Kota Bekasi menerima penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia di Tahun 2025

Gambar 3. 12 Dokumentasi Penghargaan Harmony Award Dari Kementerian Agama RI Untuk Kota Bekasi di Tahun 2025



Kota Bekasi meraih penghargaan Harmony Award 2025 dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan karena komitmen tinggi Pemerintah Kota Bekasi dalam pemeliharaan kerukunan Bergama di wilayah

Kota Bekasi. Penghargaan ini merupakan hasil kerja dari program partisipatif dan ruang dialog lintas umat beragama yang rutin dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi bersama *stakeholder* terkait.

Kegiatan kolaboratif seperti Focus Group Discussion (FGD) yang intensif dengan melibatkan pemerintah daerah, pemuka agama, dan tokoh masyarakat berperan penting dalam memperkuat hubungan antaragama baik yang diselenggarakan dan di fasilitasi oleh Badan Kesbangpol atau FKUB Kota Bekasi. Diskusi ini tidak hanya membantu saling memahami perbedaan, tetapi juga mencari solusi untuk potensi konflik dan menyampaikan pesan damai. Dengan dukungan dari semua elemen masyarakat, Kota Bekasi berhasil menciptakan lingkungan yang nyaman dan damai untuk menjalankan norma agama, menjadikannya contoh bagi daerah lain dalam menciptakan kerukunan dan toleransi.

3.6 KOLABORASI LINTAS SEKTOR

Keberhasilan Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama beberapa pihak. Pihak-pihak ini berasal dari berbagai instansi serta perwakilan tokoh masyarakat di Kota Bekasi. Untuk mempermudah pelaksanaan tugas, dibentuklah tim dan forum, antara lain:

a) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi

FKUB merupakan forum lintas agama yang dibentuk untuk melakukan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama dan membina serta memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah. FKUB Kota Bekasi dibentuk melalui Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 450/Kep.130 -Kesbangpol/III/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 450/Kep.412-Kesbangpol/VIII/2021 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi Masa Bakti 2021-2026.

b) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Bekasi

FPK dibentuk dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 341/Kep.246.A.Kesbangpol/IV/2020 dan memiliki fungsi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat rentan terhadap konflik melalui pembauran antar suku agar fanatisme kesukuan tidak memicu konflik.

c) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Bekasi

Untuk mengatasi gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat maka dibentuklah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. FKDM Kota Bekasi dibentuk dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Ke.75.A-Kesbangpol/II/2021. Pembentukan FKDM dimaksudkan untuk membantu instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui upaya deteksi dini terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala suatu peristiwa.

d) Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kota Bekasi

Tim Kewaspadaan Dini di dalamnya termasuk Komunitas Intelejen Daerah merupakan komunitas yang bertugas mengkoordinasikan, menyusun dan melakukan kegiatan perencanaan umum dalam pelaksanaan operasional kegiatan intelejen, selain itu juga menggali atau mengumpulkan informasi sebanyak banyaknya dari seluruh kota tentang segala sesuatu yang berpotensi mempengaruhi stabilitas dan kondusivitas kota Bekasi. Komunitas ini terdiri dari beberapa lembaga/instansi diantaranya Polresta, Kesbangpol, Satpol PP, Kodim, BIN dan Kejari. Selain itu tim ini juga bisa memberi rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan informasi dini terhadap ancaman di daerah.

e) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Bekasi

Forkopimda merupakan Forum Koordinasi antar pimpinan lembaga yang ada di Kota Bekasi, forum ini diketuai Walikota Bekasi dan beranggotakan, Kapolresta, Komandan Kodim, Kepala Kejaksaan Negeri, dan unsur Pimpinan DPRD Kota Bekasi. Forkompida ini dibentuk dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 200.1.1/Kep.103-Kesbangpol/I/2024, untuk mengkoordinasikan dan membahas masalah pemerintahan umum di suatu daerah atau kota, dan menghasilkan kebijakan atau keputusan yang bisa didukung oleh seluruh komponen dalam pelaksanaannya, dan menjamin terlaksananya pemerintahan umum di kota Bekasi.

Tabel 3. 14 Renja Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Renja Tahun 2025 Sebelum Perubahan					Bertambah / Berkurang Pagu (Rp)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
Bidang Urusan Pemerintahan Umum												
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah		100%	100%	13.535.520.760	12.765.800.250		- (769.720.510)	Persentase kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	13.213.744.000
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai NSPK		100 %	2 Dokumen	175.000.000	136.640.000		-(38.360.000)	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	2 Dokumen	75.000.000
8.01.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	111.640.000	PAD	-(38.360.000)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000
8.01.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	25.000.000	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumny a	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	25.000.000
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai NSPK		100 %	2 Laporan	10.469.513.000	10.596.517.000		+(112.004.000)	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	100%	11.468.744.000
8.01.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1064 Orang/bu lan	1020 Orang/bulan	10.454.513.000	10.581.517.000	PAD, DAU, DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian P3K	+(127.004.000)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1316 Orang/bulan	11.453.744.000
8.01.01.2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bekasi	18 Laporan	16 Laporan	15.000.000	15.000.000	PAD	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	15.000.000
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK		100 %	2 Laporan	500.000.000	230.000.000		- (270.000.000)	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	1 Laporan	20.000.000

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Renja Tahun 2025 Sebelum Perubahan					Bertambah / Berkurang Pagu (Rp)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
8.01.01.2.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bekasi	50 Paket	50 Paket	200.000.000	200.000.000	PAD	-	-	-	-
8.01.01.2.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	10 Orang	6 Orang	50.000.000	30.000.000	PAD	-(20.000.000)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	20.000.000
8.01.01.2.05.00 11	Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-Undang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-Undang	Kota Bekasi	52 Orang	0 Orang	250.000.000	-	PAD	-(250.000.000)	-	-	-
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK		100 %	6 Laporan	1.075.000.000	1.038.700.000		-(36.300.000)	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	6 Laporan	875.000.000
8.01.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	3 Paket	3 Paket	350.000.000	350.000.000	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumny a	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	350.000.000
8.01.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Paket	6 Paket	75.000.000	38.700.000	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumny a	-(36.300.000)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	75.000.000
8.01.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	50.000.000	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumny a	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	50.000.000
8.01.01.2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	150.000.000	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumny a	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100.000.000
8.01.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	12 Laporan	12 Laporan	350.000.000	350.000.000	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumny a	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000
8.01.01.2.06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000	100.000.000	PAD	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50.000.000
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah yang disediakan		100 %	-	300.000.000	-		-(300.000.000)	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	1 Laporan	100.000.000

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Renja Tahun 2025 Sebelum Perubahan					Bertambah / Berkurang Pagu (Rp)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
8.01.01.2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi	23 Unit	0 Unit	300.000.000	-	PAD	- (300.000.000)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	100.000.000
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai NSPK		100 %	1 Laporan	516.007.760	268.543.250		- (247.464.510)	-	-	-
8.01.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	6 Laporan	516.007.760	268.543.250	PAD	- (247.464.510)			
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara		100 %	3 Laporan	500.000.000	495.400.000		-(4.600.000)	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	3 Laporan	675.000.000
8.01.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	22 Unit	22 Unit	400.000.000	400.000.000	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumny a	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	350.000.000
8.01.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bekasi	25 Unit	25 Unit	100.000.000	95.400.000	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumny a	-(4.600.000)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	75.000.000
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		100 %	100 %	2.812.569.800	1.653.737.300		- (1.158.832.5 00)	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	1.885.499.300
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah sub kegiatan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		1. 200 Orang2. 354 Orang3. 2 Dokumen 4. 52 Orang	2 Sub Kegiatan	2.812.569.800	1.653.737.300		- (1.158.832.50 0)	Jumlah sub kegiatan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4 Sub Kegiatan	1.885.499.300
8.01.02.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Bekasi	200 Oran g	85 Orang	896.130.000	500.000.000	PAD	- (396.130.000)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	50.000.000
8.01.02.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi	Kota Bekasi	354 Orang	0 Orang	580.940.500	-	PAD	- (580.940.500)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan	90 Orang	500.000.000

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Renja Tahun 2025 Sebelum Perubahan					Bertambah / Berkurang Pagu (Rp)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
	Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
8.01.02.2.01.00 07	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Kota Bekasi	2 Dokumen	0 Dokumen	181.762.000	-	PAD	- (181.762.000)	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	2 Dokumen	181.762.000
8.01.02.2.01.00 08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Kota Bekasi	52 Orang	52 Orang	1.153.737.300	1.153.737.300	DAU	-	Jumlah Paskibraka	52 Orang	1.153.737.300
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan		100 %	100 %	1.400.000.000	1.066.848.000		- (333.152.000)	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	100 %	377.820.900
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah sub kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		1900 Orang	1 Sub Kegiatan	1.400.000.000	1.066.848.000		- (333.152.000)	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	1 Sub Kegiatan	377.820.900
8.01.05.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Bekasi	1900 Orang	1500 Orang	1.400.000.000	1.066.848.000	PAD	- (333.152.000)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400 Orang	377.820.900
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik social yang diselesaikan		100 %	100 %	3.837.400.000	3.326.440.000		- (510.960.000)	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100 %	2.637.200.000

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Renja Tahun 2025 Sebelum Perubahan					Bertambah / Berkurang Pagu (Rp)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		1. 250 Orang 2. 12 Laporan 3. 12 Dokumen	3 Sub Kegiatan	3.837.400.000	3.326.440.000		- (510.960.000)	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3 Sub Kegiatan	2.637.200.000
8.01.06.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bekasi	250 Orang	50 Orang	845.200.000	334.240.000	PAD	- (510.960.000)	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70 Orang	350.000.000
8.01.06.2.01.00 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bekasi	12 Laporan	12 Laporan	537.200.000	537.200.000	PAD	-	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	534.480.000
8.01.06.2.01.00 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	12 Dokumen	12 Dokumen	2.455.000.000	2.455.000.000	PAD	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.752.720.000
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dab Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik		100 %	100 %	15.229.773.200	9.957.582.000		- (5.272.191.200)	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100 %	10.287.880.000

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Renja Tahun 2025 Sebelum Perubahan					Bertambah / Berkurang Pagu (Rp)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		1. 12 Dokumen 2. 1504 Orang	2 Sub Kegiatan	15.229.773.200	9.957.582.000		- (5.272.191.200)	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2 Sub Kegiatan	10.287.880.000
8.01.03.2.01.00 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kota Bekasi	12 Dokumen	11 Dokumen	14.479.773.200	9.868.672.000	PAD	- (4.611.101.200)	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	11 Dokumen	9.937.880.000
8.01.03.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bekasi	1504 Orang	40 Orang	750.000.000	88.910.000	PAD	- (661.090.000)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1500 Orang	350.000.000
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif		100 %	70%	9.800.000.000	9.779.956.500		-(20.043.500)	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	71 %	5.850.000.000

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Renja Tahun 2025 Sebelum Perubahan					Bertambah / Berkurang Pagu (Rp)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Sub Kegiatan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		1. 51 Dokumen 2. 400 Orang	2 Sub Kegiatan	9.800.000.000	9.779.956.500		-(20.043.500)	Jumlah sub kegiatan Program Kerja du Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Sub Kegiatan	5.850.000.000
8.01.04.2.01.00 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kota Bekasi	51 Dokumen	52 Dokumen	9.000.000.000	9.300.000.000	Sisa Lebih Hasil Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumny a	+(300.000.000)	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	5 Dokumen	5.750.000.000
8.01.04.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bekasi	400 Orang	200 Orang	800.000.000	479.956.500	PAD	- (320.043.500)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	100.000.000
TOTAL						46.615.263.760	38.550.364.050		- (8.064.899.710)			34.002.144.200

4

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bansa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2025.

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Bakesbangpol Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome ingin dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerja.

Upaya penciptaan kesatuan dan keutuhan bangsa agar tetap harmonis di Kota Bekasi dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran Bakesbangpol yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Melihat hasil dari analisis evaluasi kinerja diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Bakesbangpol Kota Bekasi secara keseluruhan dari 2 (dua) Sasaran Strategis, dimana seluruh sasaran dapat mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan.

4.2 KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA

Alokasi anggaran Bakesbangpol Kota Bekasi pada tahun 2025 sebesar Rp. **46.615.263.760,-**. Kemudian dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. **8.064.899.710,-** atau 17.30% dari total anggaran. Sehingga, total pagu anggaran Badan Kesbangpol pada TA. 2025 menjadi Rp. **38.550.364.050,-** dengan rincian sebagai berikut, Belanja Langsung Urusan (BLU) Rp. 4.091.502.803,- dan Belanja Hibah Rp. 18.183.672.000,- Seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2025 dengan realisasi keuangan 87% dan realisasi fisik Kegiatan 97%.

4.3 RENCANA TINDAK

Untuk Tahun Anggaran 2026 Bakesbangpol Kota Bekasi berupaya untuk meyakinkan kepada pemilik anggaran daerah untuk lebih memprioritaskan program-program pembangunan yang ada di Bakesbangpol Kota Bekasi, seperti kegiatan sosialisasi pendidikan politik dan kesatuan bangsa kepada masyarakat, pembinaan manajemen Ormas dan Parpol, serta memantau potensi konflik yang ada di Kota Bekasi. Diharapkan kerjasama dan koordinasi yang baik, implementasi urusan pemerintahan umum dapat menjaga stabilitas dan kesatuan bangsa di Kota Bekasi.

Kendala utama yang dihadapi Bakesbangpol Kota Bekasi di dalam melaksanakan tupoksinya adalah membangun persepsi yang sama dengan entitas perencanaan anggaran daerah bahwa fungsi kesatuan bangsa dan politik adalah fungsi yang penting di dalam menunjang stabilitas pembangunan di Kota Bekasi. Dengan adanya persepsi yang sama maka alokasi penganggaran akan menempatkan Bakesbangpol sebagai perangkat daerah yang memiliki skala prioritas tertentu di dalam mendukung pembangunan daerah.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

- a. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian sasaran perangkat daerah untuk menekan gesekan-gesekan sosial dan potensi konflik yang mungkin terjadi.
- b. Mengintensifkan deteksi dini dan cegah dini potensi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai metode.
- c. Meningkatkan toleransi, hormat menghormati dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat untuk kerukunan dan keutuhan bangsa dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai tokoh agama, pemuda daerah dan lintas suku.
- d. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi terutama ke sekolah-sekolah melalui pendidikan, FGD, perlombaan maupun pengkaderan.
- e. Meningkatkan peran media sosial sebagai sarana diseminasi dan sosialisasi mengenai etika politik, ideologi wawasan kebangsaan, kerukunan umat beragama dan antar suku bangsa agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima masyarakat luas, sehingga tercipta kondusifitas dan stabilitas daerah.

**DATA BUKTI PENDUKUNG AKUNTABILITAS ANGGARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2025
(SIPD RI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN)**

SIPD | Kementerian Dalam Negeri

Kota Bekasi
Drs. HUDI WIJAYANTO, M.Si.

Pengumuman
Dashboard Analisis
Referensi
Pengaturan
Analisis dan Rekap Data
RPJMD
RPD
RENSTRA
RKPD
Penganggaran
 • Jadwal Penganggaran
 Sub Kegiatan Belanja
 • Dokumen Anggaran
Pembayaran
Pendapatan
Standar Harga Satuan

Tahun : 2023

Sub Kegiatan Belanja

Informasi Pemutakhiran Data

Sub Kegiatan

Sumber Dana

Rekening Belanja

Pendapatan

Pembiayaan

Komponen Belanja

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Tambah Kegiatan Belanja dikunci.
Admin Daerah dapat mengubahnya di halaman RKPD > RENJA > [Pilih SKPD]

Batasan Pagu
Rp 38,550,364,050.00

Inputan Pagu
Rp 38,550,364,050.00

Pagu Validasi
Rp 38,550,364,050.00

Rincian
Rp 38,550,364,050.00

Realisasi
Rp 0.00

Persentase
0.00

Pencarian

Validasi Pagu

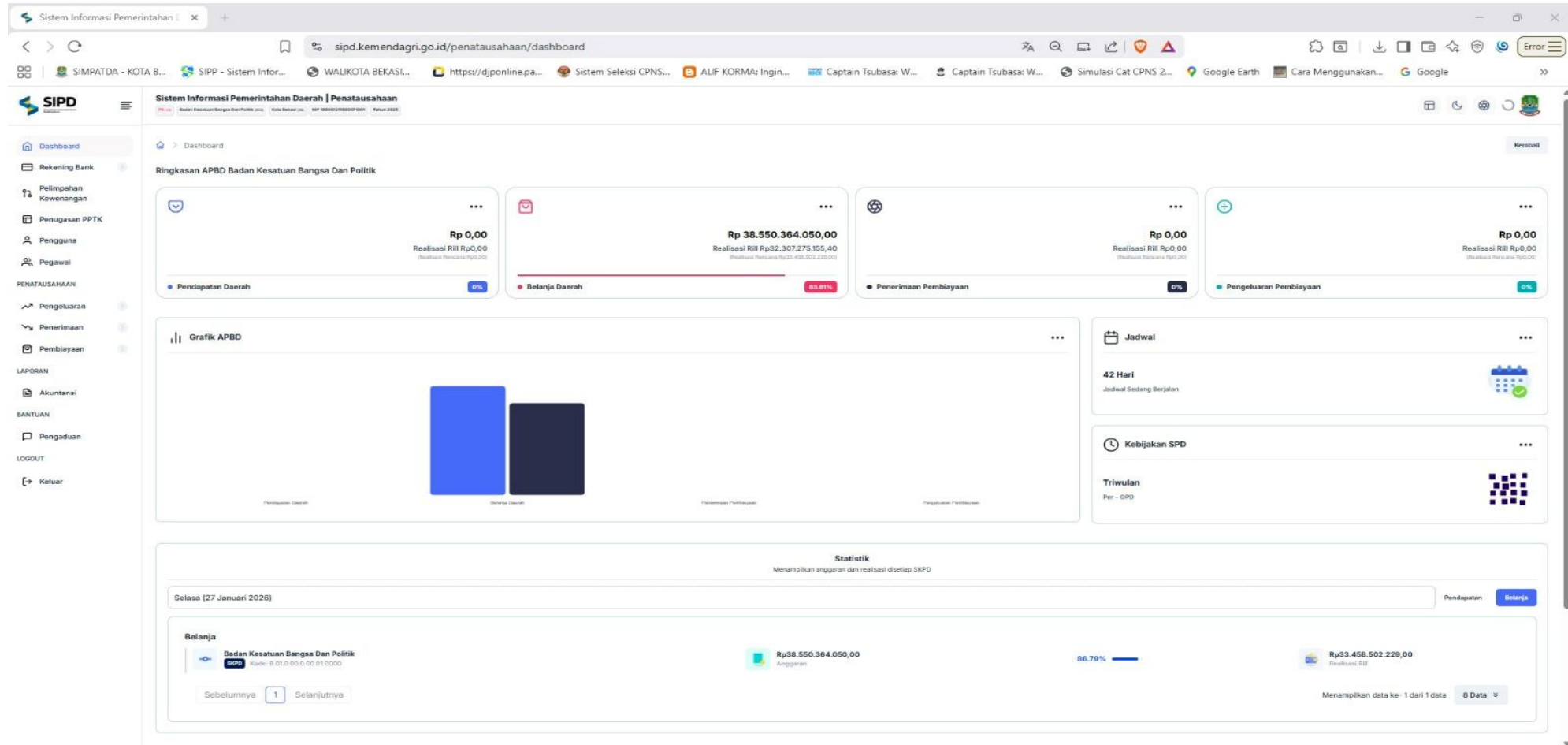
Cetak Laporan

Aksi	Sub Kegiatan	Status Sub Kegiatan	Total Rincian Setelah Perubahan	Total Realisasi Persentase
	8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik			
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			

Panduan Penggunaan

SUMBER : SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) TAHUN 2025 PADA PAGU ANGGARAN MURNI DAN PERUBAHAN BAKESBANGPOL ([HTTPS://SIPD-RI.KEMENDAGRI.GO.ID/PENGANGGARAN/ANGGARAN/CASCADING/BELANJA?ID_SKPD=903](https://sipd-ri.kemendagri.go.id/penganggaran/anggaran/cascading/belanja?ID_SKPD=903))

**DATA BUKTI PENDUKUNG AKUNTABILITAS ANGGARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2025
(SIPD RI PENATAUSAHAAN)**



SUMBER : SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PENATAUSAHAAN TAHUN 2025 ([HTTPS://SIPD.KEMENDAGRI.GO.ID/PENATAUSAHAAN/DASHBOARD](https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/dashboard))

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													
Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025													
REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD													

Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																					
Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1	Jumlah										Tahun + 1			
								Tahun N													
								Sebelum					Sesudah								
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik																					
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				Rp. 46.317.561.760	Rp. 297.702.000				Rp. 46.615.263.760	Rp. 38.550.364.050	Rp. 0				Rp. 38.550.364.050	Rp. 44.221.713.000,00
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				Rp. 46.317.561.760	Rp. 297.702.000				Rp. 46.615.263.760	Rp. 38.550.364.050	Rp. 0				Rp. 38.550.364.050	Rp. 44.221.713.000,00
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 13.237.818.760	Rp. 297.702.000				Rp. 13.535.520.760	Rp. 12.765.800.250	Rp. 0				Rp. 12.765.800.250	Rp. 13.069.513.000,00
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 175.000.000					Rp. 175.000.000	Rp. 138.640.000					Rp. 138.640.000	Rp. 175.000.000,00
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		Rp. 150.000.000					Rp. 150.000.000	Rp. 111.640.000					Rp. 111.640.000	Rp. 150.000.000,00
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000,00
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 10.469.513.000					Rp. 10.469.513.000	Rp. 10.598.517.000					Rp. 10.598.517.000	Rp. 10.469.513.000,00
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Alokasi Umum (DAU) - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	- Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		Rp. 10.454.513.000					Rp. 10.454.513.000	Rp. 10.581.517.000					Rp. 10.581.517.000	Rp. 10.454.513.000,00
8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000,00
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 500.000.000					Rp. 500.000.000	Rp. 230.000.000					Rp. 230.000.000	Rp. 600.000.000,00
8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		Rp. 200.000.000					Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000					Rp. 200.000.000	Rp. 250.000.000,00
8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 50.000.000,00
8	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 250.000.000					Rp. 250.000.000	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 300.000.000,00	
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 1.075.000.000					Rp. 1.075.000.000	Rp. 1.038.700.000					Rp. 1.038.700.000	Rp. 1.125.000.000,00
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		Rp. 350.000.000					Rp. 350.000.000	Rp. 350.000.000					Rp. 350.000.000	Rp. 350.000.000,00
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		Rp. 75.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. 38.700.000					Rp. 38.700.000	Rp. 75.000.000,00
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N								Tahun + 1		
									Sebelum				Sesudah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		Rp. 150.000.000				Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000				Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000,00
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		Rp. 350.000.000				Rp. 350.000.000	Rp. 350.000.000				Rp. 350.000.000	Rp. 400.000.000,00
8	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000,00
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 2.298.000	Rp. 297.702.000			Rp. 300.000.000	Rp. 0	Rp. 0			Rp. 0	Rp. 200.000.000,00
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Pendapatan Bagi Hasil	- Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		Rp. 2.298.000	Rp. 297.702.000			Rp. 300.000.000	Rp. 0	Rp. 0			Rp. 0	Rp. 200.000.000,00
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 516.007.760				Rp. 516.007.760	Rp. 268.543.250				Rp. 268.543.250	
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		Rp. 516.007.760				Rp. 516.007.760	Rp. 268.543.250				Rp. 268.543.250	
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 500.000.000				Rp. 500.000.000	Rp. 495.400.000				Rp. 495.400.000	Rp. 500.000.000,00
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		Rp. 400.000.000				Rp. 400.000.000	Rp. 400.000.000				Rp. 400.000.000	Rp. 400.000.000,00
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 95.400.000				Rp. 95.400.000	Rp. 100.000.000,00
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				Rp. 2.812.569.800				Rp. 2.812.569.800	Rp. 1.653.737.300				Rp. 1.653.737.300	Rp. 2.860.000.000,00
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				Rp. 2.812.569.800				Rp. 2.812.569.800	Rp. 1.653.737.300				Rp. 1.653.737.300	Rp. 2.860.000.000,00
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 896.130.000				Rp. 896.130.000	Rp. 500.000.000				Rp. 500.000.000	Rp. 900.000.000,00
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 580.940.500				Rp. 580.940.500	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 600.000.000,00
8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Purnapaskibraka	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 181.762.000				Rp. 181.762.000	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 200.000.000,00
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.153.737.300				Rp. 1.153.737.300	Rp. 1.153.737.300				Rp. 1.153.737.300	Rp. 1.160.000.000,00
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				Rp. 15.229.773.200				Rp. 15.229.773.200	Rp. 9.957.582.000				Rp. 9.957.582.000	Rp. 12.750.000.000,00
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				Rp. 15.229.773.200				Rp. 15.229.773.200	Rp. 9.957.582.000				Rp. 9.957.582.000	Rp. 12.750.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1					
									Sebelum				Sesudah						
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)					
8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.479.773.200					Rp. 14.479.773.200	Rp. 9.868.672.000			Rp. 9.868.672.000	Rp. 12.000.000.000,00
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 750.000.000					Rp. 750.000.000	Rp. 88.910.000			Rp. 88.910.000	Rp. 750.000.000,00
8	01		04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				Rp. 9.800.000.000					Rp. 9.800.000.000	Rp. 9.779.956.500			Rp. 9.779.956.500	Rp. 10.800.000.000,00
8	01		04	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				Rp. 9.800.000.000					Rp. 9.800.000.000	Rp. 9.779.956.500			Rp. 9.779.956.500	Rp. 10.800.000.000,00
8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.000.000.000					Rp. 9.000.000.000	Rp. 9.300.000.000			Rp. 9.300.000.000	Rp. 10.000.000.000,00
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 800.000.000					Rp. 800.000.000	Rp. 479.956.500			Rp. 479.956.500	Rp. 800.000.000,00
8	01		05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				Rp. 1.400.000.000					Rp. 1.400.000.000	Rp. 1.068.848.000			Rp. 1.068.848.000	Rp. 1.400.000.000,00
8	01		05	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				Rp. 1.400.000.000					Rp. 1.400.000.000	Rp. 1.068.848.000			Rp. 1.068.848.000	Rp. 1.400.000.000,00
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencogahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Pendapatan Bagi Hasil	- Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.400.000.000					Rp. 1.400.000.000	Rp. 1.068.848.000			Rp. 1.068.848.000	Rp. 1.400.000.000,00
8	01		06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				Rp. 3.837.400.000					Rp. 3.837.400.000	Rp. 3.326.440.000			Rp. 3.326.440.000	Rp. 3.342.200.000,00
8	01		06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				Rp. 3.837.400.000					Rp. 3.837.400.000	Rp. 3.326.440.000			Rp. 3.326.440.000	Rp. 3.342.200.000,00
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelelji, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Pendapatan Bagi Hasil	- Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 845.200.000					Rp. 845.200.000	Rp. 334.240.000			Rp. 334.240.000	Rp. 850.000.000,00
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelelji, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Pendapatan Bagi Hasil	- Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 537.200.000					Rp. 537.200.000	Rp. 537.200.000			Rp. 537.200.000	Rp. 537.200.000,00
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	- Pendapatan Bagi Hasil	- Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.455.000.000					Rp. 2.455.000.000	Rp. 2.455.000.000			Rp. 2.455.000.000	Rp. 1.955.000.000,00
Jumlah									Rp. 46.317.561.760	Rp. 297.702.000				Rp. 46.615.263.760	Rp. 38.550.364.050	Rp. 0		Rp. 38.550.364.050	Rp. 44.221.713.000,00

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR PERUBAHAN DPPA-BELANJA SKPD											
KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2025																					
Nomor DPPA : DPPA/A.4/8.01.0.00.0.00.01.0000/002/2025																					
SKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik																					
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T. 1	Jumlah												T+1
									Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik									Rp46.317.561.760,00	Rp297.702.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.615.263.760,00	Rp38.550.364.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.550.364.050,00	(Rp8.064.899.710,00)	(20.92)	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				Rp46.317.561.760,00	Rp297.702.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.615.263.760,00	Rp38.550.364.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.550.364.050,00	(Rp8.064.899.710,00)	(20.92)	
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				Rp46.317.561.760,00	Rp297.702.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.615.263.760,00	Rp38.550.364.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.550.364.050,00	(Rp8.064.899.710,00)	(20.92)	
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp13.237.818.760,00	Rp297.702.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.535.520.760,00	Rp12.765.800.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.765.800.250,00	(Rp769.720.510,00)	(6.03)	
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp175.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.000.000,00	Rp136.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp136.640.000,00	(Rp38.360.000,00)	(28.07)	
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp111.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp111.640.000,00	(Rp38.360.000,00)	(34.36)	
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp10.469.513.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.469.513.000,00	Rp10.596.517.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.596.517.000,00	Rp127.004.000,00	1.20	
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU); DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; PENDAPATAN	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		Rp10.454.513.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.454.513.000,00	Rp10.581.517.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.581.517.000,00	Rp127.004.000,00	1.20	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR PERUBAHAN DPPA-BELANJA SKPD											
KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2025																					
Nomor DPPA : DPPA/A.4/8.01.0.00.0.00.01.0000/002/2025																					
SKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik																					
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																					
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T. 1	Jumlah												T+1
									Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik									Rp46.317.561.760,00	Rp297.702.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.615.263.760,00	Rp38.550.364.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.550.364.050,00	(Rp8.064.899.710,00)	(20.92)	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				Rp46.317.561.760,00	Rp297.702.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.615.263.760,00	Rp38.550.364.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.550.364.050,00	(Rp8.064.899.710,00)	(20.92)	
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				Rp46.317.561.760,00	Rp297.702.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.615.263.760,00	Rp38.550.364.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.550.364.050,00	(Rp8.064.899.710,00)	(20.92)	
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp13.237.818.760,00	Rp297.702.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.535.520.760,00	Rp12.765.800.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.765.800.250,00	(Rp769.720.510,00)	(6.03)	
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp175.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.000.000,00	Rp136.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp136.640.000,00	(Rp38.360.000,00)	(28.07)	
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp111.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp111.640.000,00	(Rp38.360.000,00)	(34.36)	
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp10.469.513.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.469.513.000,00	Rp10.596.517.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.596.517.000,00	Rp127.004.000,00	1.20	
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU); DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; PENDAPATAN	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		Rp10.454.513.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.454.513.000,00	Rp10.581.517.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.581.517.000,00	Rp127.004.000,00	1.20	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah / (Berkurang)		T+1
								T-1	Tahun													
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
					Perundang-undangan	Tahun Sebelumnya																
8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	0.00			
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	Rp350.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00	Rp350.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00	Rp0,00	0.00			
8	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	0.00			
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp2.298.000,00	Rp297.702.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp300.000.000,00)	(Infinity)			
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pendapatan Bagi Hasil	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	Rp2.298.000,00	Rp297.702.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp300.000.000,00)	(Infinity)			
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp516.007.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp516.007.760,00	Rp268.543.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp268.543.250,00	(Rp247.464.510,00)	(92.15)			
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya; Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp516.007.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp516.007.760,00	Rp268.543.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp268.543.250,00	(Rp247.464.510,00)	(92.15)			
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000.000,00	Rp495.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp495.400.000,00	(Rp4.600.000,00)	(0.93)			
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	Rp400.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000.000,00	Rp0,00	0.00			

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												T+1	
								T 1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp		%
					Kendaraan Dinas Jabatan																
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp95.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.400.000,00	(Rp4.600.000,00)	(4.82)	
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCA SILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				Rp2.812.569.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.812.569.800,00	Rp1.653.737.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.653.737.300,00	(Rp1.158.832.500,00)	(70.07)	
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				Rp2.812.569.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.812.569.800,00	Rp1.653.737.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.653.737.300,00	(Rp1.158.832.500,00)	(70.07)	
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp896.130.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp896.130.000,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000.000,00	(Rp396.130.000,00)	(79.23)	
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp580.940.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp580.940.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp580.940.500,00)	(Infinity)	
8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp181.762.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp181.762.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp181.762.000,00)	(Infinity)	

Urusan	Bidang Unsan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												T+1	
								T. 1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah					Rp		%
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.153.737.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.153.737.300,00	Rp1.153.737.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.153.737.300,00	Rp0,00	0.00	
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				Rp15.229.773.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.229.773.200,00	Rp9.957.582.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.957.582.000,00	(Rp5.272.191.200,00)	(52.95)	
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				Rp15.229.773.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.229.773.200,00	Rp9.957.582.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.957.582.000,00	(Rp5.272.191.200,00)	(52.95)	
8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp14.479.773.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.479.773.200,00	Rp9.868.672.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.868.672.000,00	(Rp4.611.101.200,00)	(46.72)	
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp750.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp750.000.000,00	Rp88.910.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.910.000,00	(Rp661.090.000,00)	(743.55)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah / (Berkurang)		T+1
								Tahun													
								T-1	Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			Rp9.800.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.800.000.000,00	Rp9.779.956.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.779.956.500,00	(Rp20.043.500,00)	(0.20)		
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			Rp9.800.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.800.000.000,00	Rp9.779.956.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.779.956.500,00	(Rp20.043.500,00)	(0.20)		
8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp9.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000.000,00	Rp9.300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.300.000.000,00	Rp300.000.000,00	3.23		
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp800.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000.000,00	Rp479.956.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp479.956.500,00	(Rp320.043.500,00)	(66.68)		

Urusan	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												T+1	
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp		%
					Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			Rp1.400.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.400.000.000,00	Rp1.066.848.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.066.848.000,00	(Rp333.152.000,00)	(31.23)		
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			Rp1.400.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.400.000.000,00	Rp1.066.848.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.066.848.000,00	(Rp333.152.000,00)	(31.23)		
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pendapatan Bagi Hasil	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.400.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.400.000.000,00	Rp1.066.848.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.066.848.000,00	(Rp333.152.000,00)	(31.23)		
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			Rp3.837.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.837.400.000,00	Rp3.326.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.326.440.000,00	(Rp510.960.000,00)	(15.36)		
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			Rp3.837.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.837.400.000,00	Rp3.326.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.326.440.000,00	(Rp510.960.000,00)	(15.36)		
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Pendapatan Bagi Hasil	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp845.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp845.200.000,00	Rp334.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp334.240.000,00	(Rp510.960.000,00)	(152.87)		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											T+1		
								T. 1	Tahun											Bertambah / (Berkurang)	
									Sebelum					Setelah						Rp	%
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
					Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pendapatan Bagi Hasil	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp537.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp537.200.000,00	Rp537.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp537.200.000,00	Rp0,00	0.00		
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Pendapatan Bagi Hasil	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.455.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.455.000.000,00	Rp2.455.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.455.000.000,00	Rp0,00	0.00		

**DATA BUKTI PENDUKUNG AKUNTABILITAS ANGGARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2025
(SIMPELBANG)**

Simpelbang

Sistem Pelaporan Pembangunan

2025

Language

Account

Sign out

Dashboard

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politi

Online

Main Navigation

Dashboard

Chart

Sub Kegiatan

Laporan

\$

Silakan memilih Sub Unit

Export

Pdf

Keyword

All columns

Options	Kode	Sub Unit	Anggaran	Realisasi	Selisih	Realisasi Fisik
	4.12.01.01	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	38,550,364,050	33,430,166,273	5,120,197,777	96.65

Showing 1 - 1 Of 1 Entry found

First

<

1

>

Last

DATA BUKTI PENDUKUNG AKUNTABILITAS ANGGARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2025
(E-MONEV SIENCANG)

